



DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

**LKIP**

**DISDUKCAPIL**

**2024**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan perpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kebutuhan yang tak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang ditargetkan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan *good governance dan clean government*.



Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Ciamis, Januari 2025



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS,

**YAYAN MUHAMMAD SUPYAN, A.P., S.I.P., M.M.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19740515 199311 1 002



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2024 ini memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut disusun berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis



diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan menghasilkan prestasi kinerja yang dihasilkan ditahun 2024, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk, dengan indikator:
  - a. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga  
Target tahun 2024 sebesar 100% diukur dengan formulasi Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dibagi Jumlah Kepala Keluarga dikali 100%, berdasarkan perhitungan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah 100% realisasi kinerja 100%
  - b. Persentase Kepemilikan KTP-el  
Target tahun 2024 sebesar 99% diukur dengan formulasi Jumlah Penduduk Wajib KTP-el yang memiliki KTP-el dibagi Jumlah Penduduk wajib KTP-el dikali 100%, berdasarkan perhitungan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah ... realisasi kinerja ...%
  - c. Persentase Kepemilikan KIA  
Target tahun 2024 sebesar 30% diukur dengan formulasi Jumlah Anak 0-17 tahun kurang dari satu hari sudah memiliki KIA dibagi Jumlah Anak 0-17 tahun dikali 100%, berdasarkan perhitungan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah ... realisasi kinerja ...%
2. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil, dengan indikator:
  - a. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran  
Target tahun 2024 sebesar 60% diukur dengan formulasi Jumlah Penduduk sudah memiliki Akta Kelahiran dibagi Jumlah Penduduk dikali 100%, berdasarkan perhitungan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah ... realisasi kinerja ...%



- b. Persentase Kepemilikan Akta Kematian  
Target tahun 2024 sebesar 100% diukur dengan formulasi Jumlah Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah Peristiwa Kematian yang dilaporkan dikali 100%, berdasarkan perhitungan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah 100% realisasi kinerja 100%
3. Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dengan indikator:  
Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Target tahun 2024 sebesar 28 OPD diukur dengan formulasi Jumlah OPD yang tersedian perangkat SIAK, berdasarkan perhitungan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah 28 OPD realisasi kinerja 100%
4. Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan, dengan indikator:  
Jumlah SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data, Target tahun 2024 sebesar 13 SKPD/Lembaga diukur dengan formulasi Jumlah SKPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data Adminduk berdasarkan Perjanjian Kerjasama, berdasarkan perhitungan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah 28 OPD/Lembaga realisasi kinerja 215,38%
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah, dengan indikator:
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat  
Target tahun 2024 sebesar (Nilai) 81,25 diukur dengan formulasi Hasil penilaian Pemerintah Kabupaten Ciamis, berdasarkan perhitungan realisasi kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah (Nilai) 92,17 realisasi kinerja 113,44%
  - b. Hasil Evaluasi AKIP  
Target tahun 2024 sebesar A (Predikat) diukur dengan formulasi Hasil penilaian Pemerintah Kabupaten Ciamis, berdasarkan perhitungan



capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah BB (Predikat) realisasi kinerja 91,25%

c. Level Maturitas SPIP

Target tahun 2024 sebesar (Level) 3 diukur dengan formulasi Hasil penilaian Pemerintah Kabupaten Ciamis, berdasarkan perhitungan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah (Level) 3 realisasi kinerja 100%

d. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan

Target tahun 2024 sebesar (Nilai) 770 (Nilai) diukur dengan formulasi Hasil penilaian Pemerintah Kabupaten Ciamis, berdasarkan perhitungan capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah (Nilai) 770,79 realisasi kinerja 100,10%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan utamanya kepemilikan KTP-el menjelang Pemilu serentak di Tahun 2024;
2. Meningkatnya kemudahan akses pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
3. Meningkatnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan *stakeholder* terkait.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GRAFIK .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Struktur Organisasi .....	2
B. Tugas dan Fungsi .....	4
C. Isu Strategis .....	12
D. Cascading Kinerja .....	14
E. Proses Bisnis .....	32
F. Keadaan Pegawai .....	70
G. Keadaan Sarana dan Prasarana .....	73
H. Keuangan .....	76
I. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi .....	76
J. Sistematika Penulisan .....	78
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	80
A. Perencanaan Strategis .....	80
B. Perjanjian Kinerja .....	87
C. Rencana Anggaran Tahun 2022 .....	89
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	94
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	97
BAB IV PENUTUP .....	125
LAMPIRAN .....	126



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pemetaan Permasalahan .....	13
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Disdukcapil Kabupaten Ciamis Per Desember 2023 .....	70
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Disdukcapil Kabupaten Ciamis berdasarkan Golongan .....	72
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Disdukcapil Kabupaten Ciamis berdasarkan Eselon .....	72
Tabel 1.5	Daftar Inventaris Disdukcapil .....	74
Tabel 2.1	Ringkasan Visi & Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 .....	81
Tabel 2.2	Tujuan dan Indikator Tujuan Disdukcapil Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 .....	82
Tabel 2.3	Sasaran & Indikator Sasaran Disdukcapil Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 .....	83
Tabel 2.4	Penyandingan Program RPJMD & Program Permendagri 90 Tahun 2019 .....	84
Tabel 2.5	Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	85
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Disdukcapil Tahun 2023 .....	87
Tabel 2.7	Perubahan Perjanjian Kinerja Disdukcapil Tahun 2023 .....	88
Tabel 2.8	Target Belanja Disdukcapil Kabupaten Ciamis APBD Perubahan Tahun 2023 .....	89
Tabel 2.9	Perubahan Anggaran Belanja Disdukcapil Tahun 2023 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	90
Tabel 2.10	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis .....	93
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	94
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	95
Tabel 3.3	Capaian IKU Adminduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2023 .....	96
Tabel 3.4	Capaian IKU Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 .....	96
Tabel 3.5	Metadata Indikator Program Disdukcapil .....	97
Tabel 3.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	108
Tabel 3.7	Target Realisasi Kinerja Tahun 2023 .....	109
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Jangka Menengah Tahun 2020-2024 .....	110



Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Tahun 2023 .....	114
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Program Urusan dan Penunjang Sasaran Tahun 2023 .....	115
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Disdukcapil Tahun 2023 ...	119
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Belanja Non Pegawai Disdukcapil Tahun 2023 .....	120
Tabel 3.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Pencapaian Sasaran Tahun 2023 .....	123
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran Program Urusan dan Penunjang Sasaran Tahun 2023.....	124



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Disdukcapil Kabupaten Ciamis Per Desember 2023 .....	71
Grafik 1.2	Jumlah Pegawai Disdukcapil Kabupaten Ciamis berdasarkan Jenis Kelamin .....	71
Grafik 1.3	Jumlah Pegawai Disdukcapil Kabupaten Ciamis berdasarkan Golongan .....	72
Grafik 1.4	Jumlah Pegawai Disdukcapil Kabupaten Ciamis berdasarkan Eselon .....	73



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Susunan Organisasi Disdukcapil Kabupaten Ciamis ....	3
Gambar 1.2	Bagan Proses Bisnis Disdukcapil Kabupaten Ciamis .....	14
Gambar 1.3	Cascading Disdukcapil Kabupaten Ciamis .....	33



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan menyajikan capaian kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun dengan menyajikan capaian kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis periode tahun 2024 yang dikaitkan dengan perubahan rencana strategis dan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang



- didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan kinerjanya; dan
  4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis didalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.1 Struktur Organisasi**

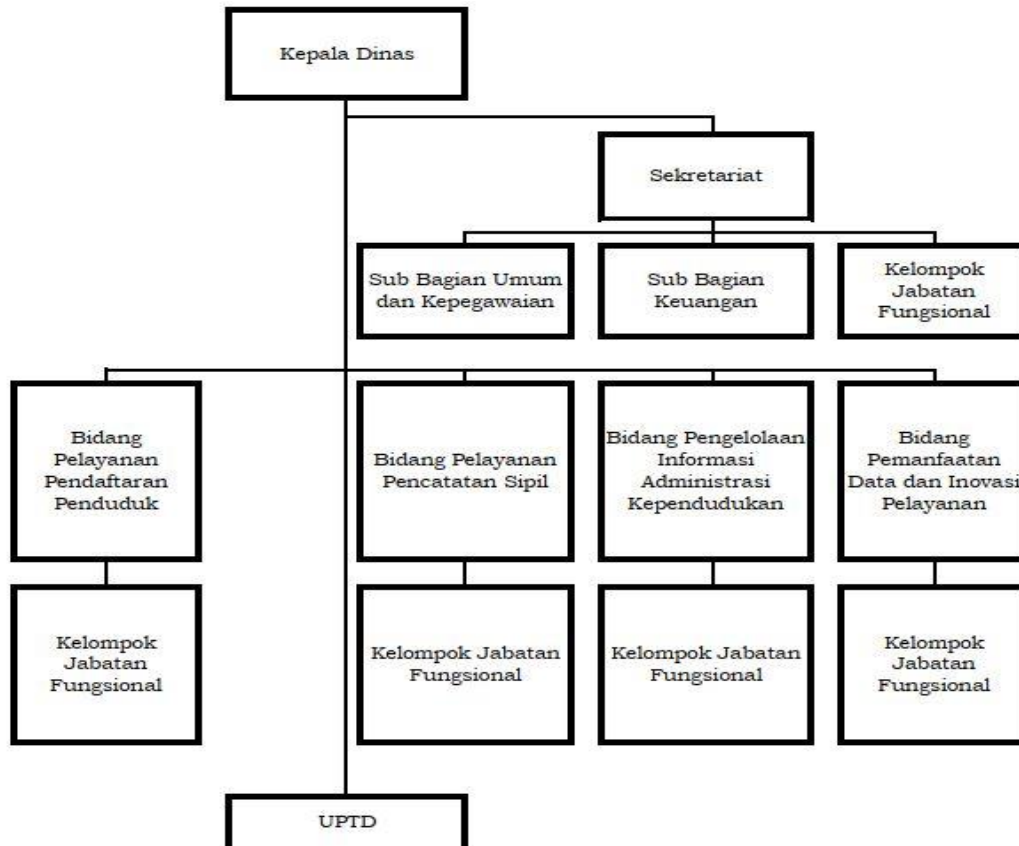
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. UPT.



Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai mana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



## 1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah



dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan profil kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan profil kependudukan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:



- a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- b) Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;



- c) Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
  - d) Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - e) Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
  - f) Pelaksanaan verifikasi keuangan;
  - g) Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - h) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
  - i) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  - j) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian, pengelolaan aset/barang milik daerah dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b) Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c) Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d) Pengelolaan perlengkapan dinas;



- e) Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
  - f) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  - g) Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
  - h) Pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
  - i) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi Kelompok Subtansi.
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
  - b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;



- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi dibantu Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi Kelompok Subtansi.

### 3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;



- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi dibantu Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi Kelompok Subtansi.

#### 4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan serta penyajian data kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi



- kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi dibantu Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi Kelompok Subtansi.

#### 5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan



kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas fungsinya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi dibantu Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

#### 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas,

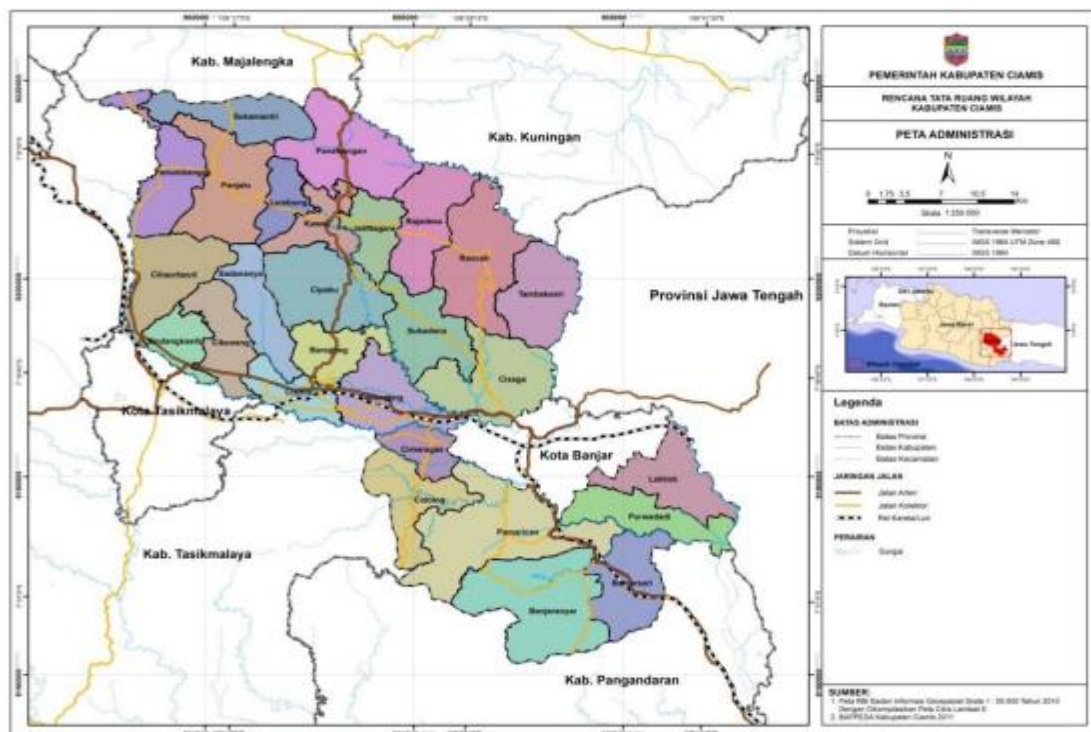


mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu, juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi Kelompok Subtansi.

### 1.3 Isu-isu Strategis

Kabupaten Ciamis dengan luas wilayah 1.595,94 km<sup>2</sup> berpenduduk 1.293.235 jiwa pada tahun 2024 merupakan kota yang bersifat “terbuka dan memiliki berbagai potensi kewilayahan yang menarik” sehingga menjadi tempat tujuan migrasi penduduk dengan berbagai kepentingan.

Gambar 1.2 Peta Kabupaten Ciamis



Dinamika pergerakan penduduk yang cukup tinggi merupakan tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Isu Strategis Kependudukan merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan yang berpengaruh luas terhadap masyarakat.



Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi SIAK terpusat mempengaruhi proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kabupaten maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon;
2. Perubahan dokumen administrasi kependudukan menjadi dokumen digital memerlukan pemahaman atas perubahan sistem pemanfaatan dokumen oleh masyarakat dan lembaga pengguna;
3. Adanya kebijakan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memerlukan upaya khusus dalam pelayanan untuk mencapai target yang ditetapkan mengingat belum dirasakannya kebutuhan kepemilikan IKD di tengah masyarakat;
4. Peningkatan kualitas data kependudukan dalam rangka persiapan pemilu serentak tahun 2024;
5. Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

#### **1.4 Cascading Kinerja**

Sebagai upaya mengatasi permasalahan dan isu strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis memiliki Cascading Kinerja dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Renstra Disdukcapil Tahun 2019-2024 yang berpedoman pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, maka berikut merupakan gambaran Cascading kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.



**Tabel 1.1**  
**Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupeten Ciamis**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat									
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga 2. Persentase Kepemilikan KTP-el 3. Persentase Kepemilikan KIA	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga 2. Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	Program Pendaftaran penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Kartu Keluarga yang Diterbitkan 2. Jumlah KTP ber-NIK yang Diterbitkan 3. Jumlah KIA yang Diterbitkan	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Pendataan Non Permanen	Jumlah Dokumen Pendataan Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
								Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
								Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
								Meningkatnya Pelayanan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan	Peningkatan Pelayanan



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendaftaran Penduduk
								Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
								Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
								Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
								Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
					Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Penyelenggaraan Penduduk Rentan sesuai Tata Cara 2. Jumlah Penyelenggaraan Adminduk Kartu Keluarga sesuai Tata Cara	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
						3. Jumlah Penyelenggaraan Adminduk KTP sesuai Tata Cara 4. Jumlah Penyelenggaraan Adminduk KIA sesuai Tata Cara 5. Jumlah Penyelenggaraan SKPWNI sesuai Tata Cara		Pendaftaran Penduduk	Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Penduduk
								Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
					Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Penduduk Terfasilitasi Sarana Prasarana Pendaftaran Penduduk 2. Jumlah Masyarakat Terakses Informasi Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
								Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
								Terfasilitasinya Pendaftaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	Fasilitasi Pendaftaran



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Penduduk	pendaftaran penduduk	Penduduk
								Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk
								Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
								Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk
								Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk
								Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
					Terlaksananya Binwas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Aduan Pendaftaran Penduduk yang Ditindaklanjuti	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
								Terbinanya dan Terawasanya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk
								Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 2. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	Terlaksananya Pencatatan Sipil	1. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 2. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Program Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan 2. Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
								Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
								Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
								Tersedianya Dokumen Tata Cara	Jumlah Dokumen Tata Cara	Penyusunan Tata Cara Perencanaan,



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil
								Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan
					Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Penduduk yang Terfasilitasi Sarana Prasarana Pencatatan Sipil 2. Jumlah Masyarakat Terakses Informasi Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah,



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
								Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
								Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
								Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil
								Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
								Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil
								Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
								Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil
								Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pencatatan Sipil
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
								Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil
								Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan	Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
								Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Data kependudukan oleh Lembaga Pengguna	Jumlah Data Kependudukan yang Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
								Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
								Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
					Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi	Jumlah Laporan Penataan Pengelolaan Informasi	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaksanaan,	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaksanaan,	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
					Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan	Kependudukan	Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi	Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
								Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
								Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
								Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
								Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
								Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
								Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
								Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
		Meningkatnya Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Data Profil Kependudukan yang Dikelola	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
								Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Perkembangan dan Proyeksi	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								serta Kebutuhan yang Lain	Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Hasil Evaluasi AKIP 3. Level Maturitas SPIP 4. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik 2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan Disdukcapil	1. Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik 2. Persentase Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Disdukcapil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
								Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
								Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
								Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	
								Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
								Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Tersedianya Dokumen Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
								Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
								Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
								Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD
					Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
								Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
								Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
								Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
								Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
								Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
					Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
								Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
								Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
								Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
								Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
								Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan	
								Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
								Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
								Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan dan Perlengkapan Kantor
								Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
								Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Tersedianya Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Penyediaan Barang Cetak



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan	dan Penggandaan
								Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
								Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
								Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
					Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
								Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
								Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
								Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Sub Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
								Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel
								Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
								Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
								Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber: Perubahan Renstra Disdukcapil Tahun 2019-2024



## 1.5 Proses Bisnis

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Pasal 2 menjelaskan bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Ciamis juga telah menetapkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 060/Kpts. 79-Huk/2022 tentang Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Mendasari hal tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Nomor: 470/Kpts. 5-Disdukcapil/2022 tentang Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Sebagai gambaran, berikut Proses Bisnis level 0 s.d. level 2 dari Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.



# Proses Bisnis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

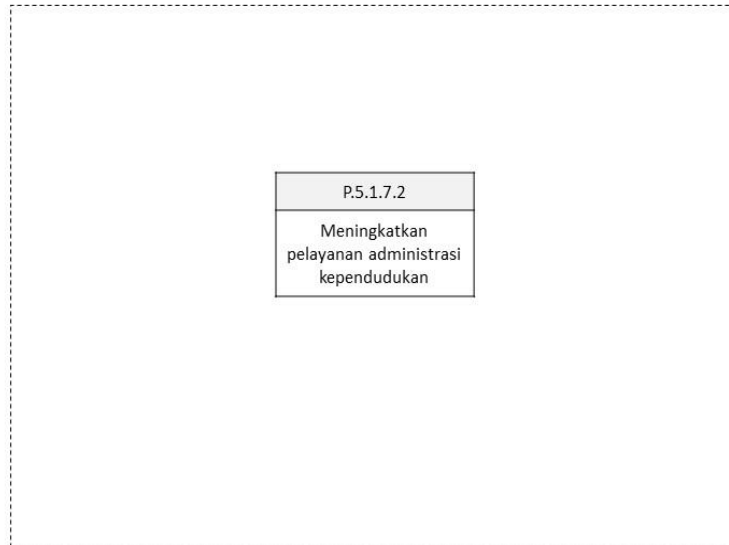
P.5 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

P.5.1

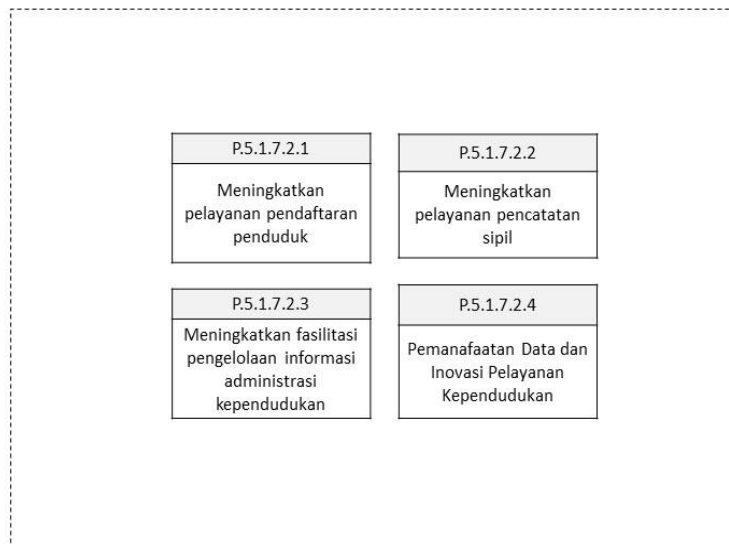
Meningkatkan transformasi reformasi birokrasi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik



**P.5.1.7 Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik**

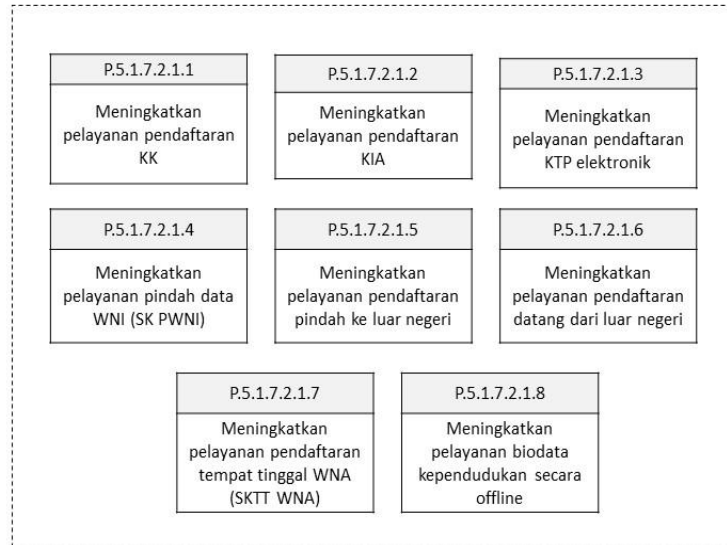


**P.5.1.7.2 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan**

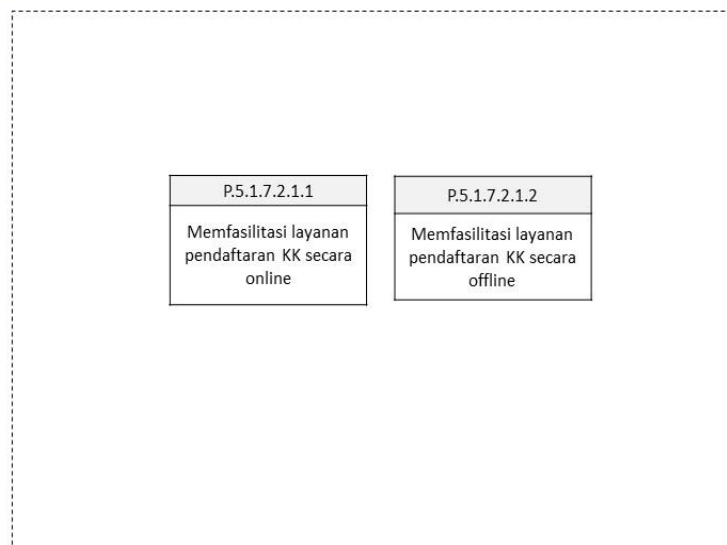




**P.5.1.7.2.1 Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk**



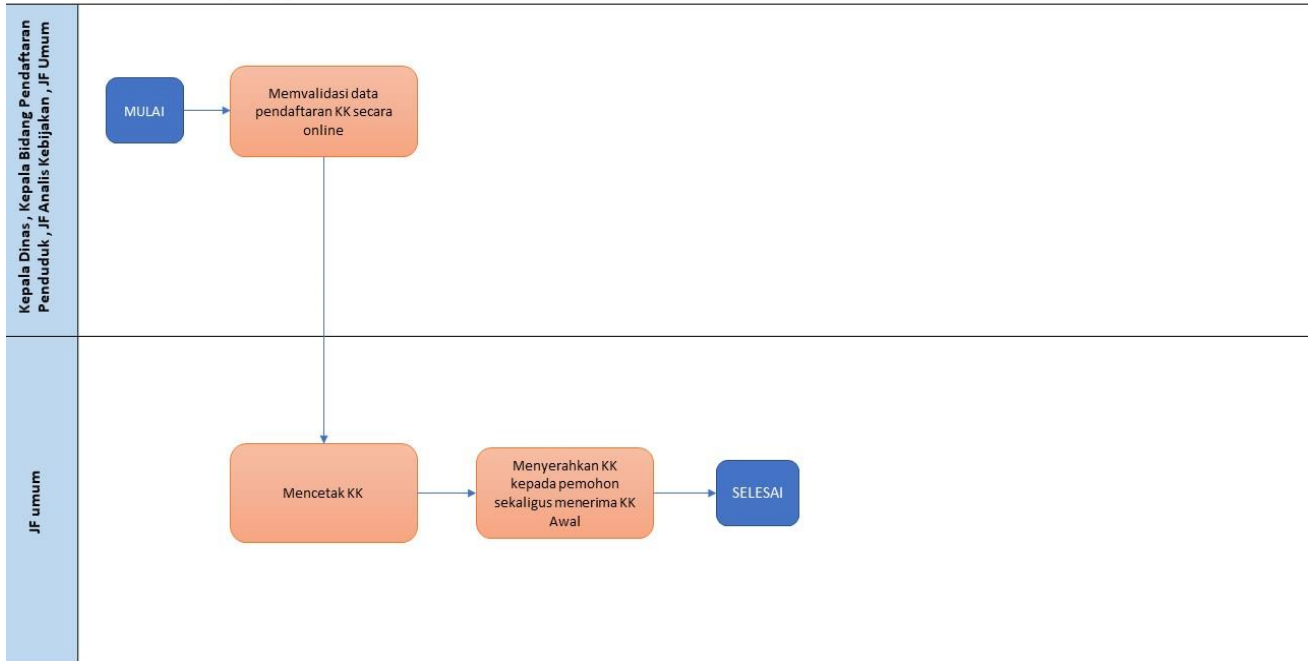
**P.5.1.7.2.1.1 Meningkatkan pelayanan pendaftaran KK**





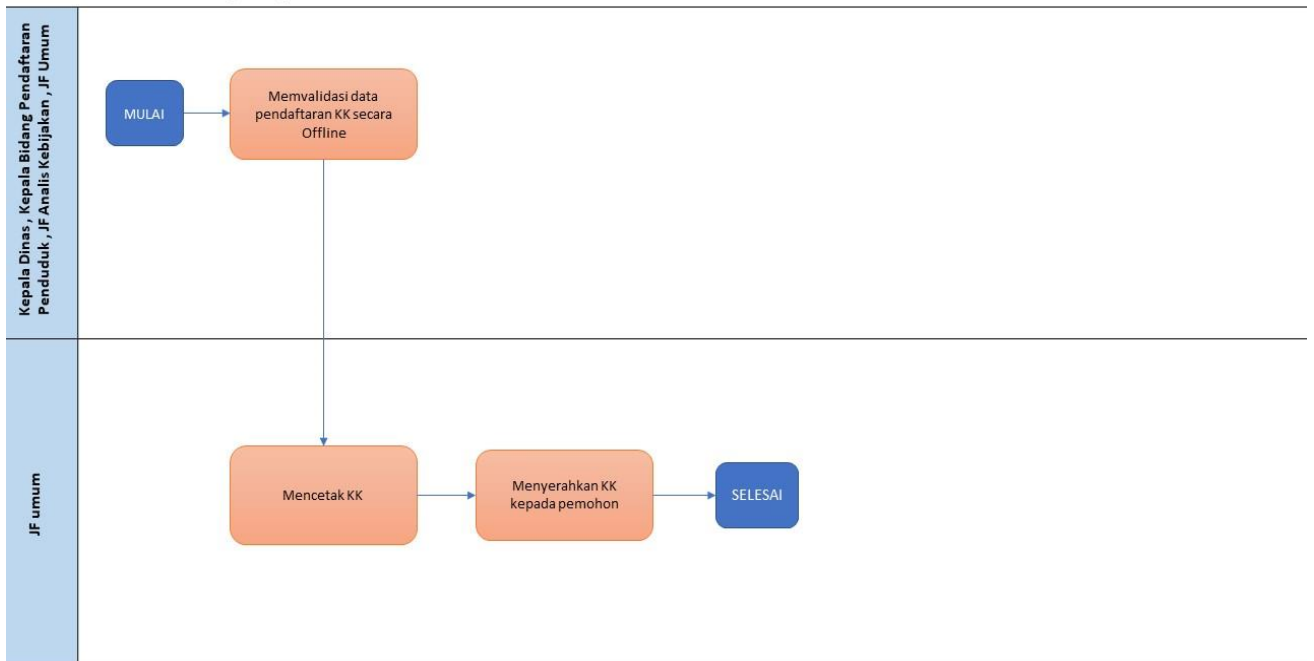
PETA LINTAS FUNGSI

P.5.1.7.2.1.1 Memfasilitasi layanan pendaftaran KK secara online



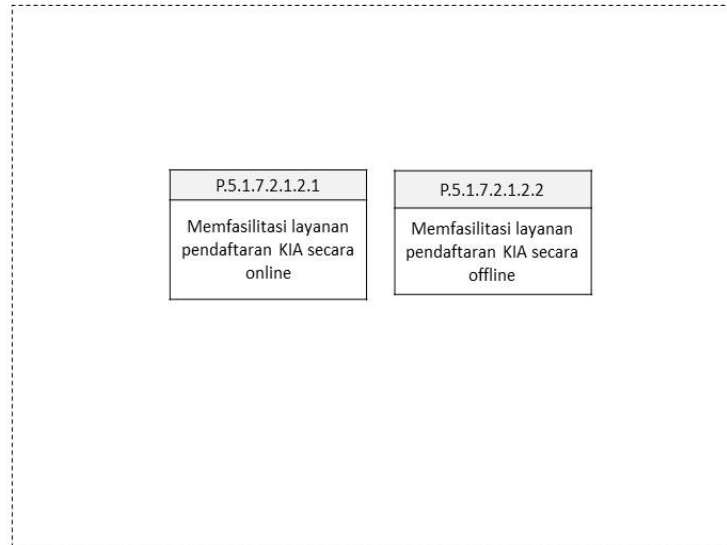
PETA LINTAS FUNGSI

P.5.1.7.2.1.2 Memfasilitasi layanan pendaftaran KK secara offline



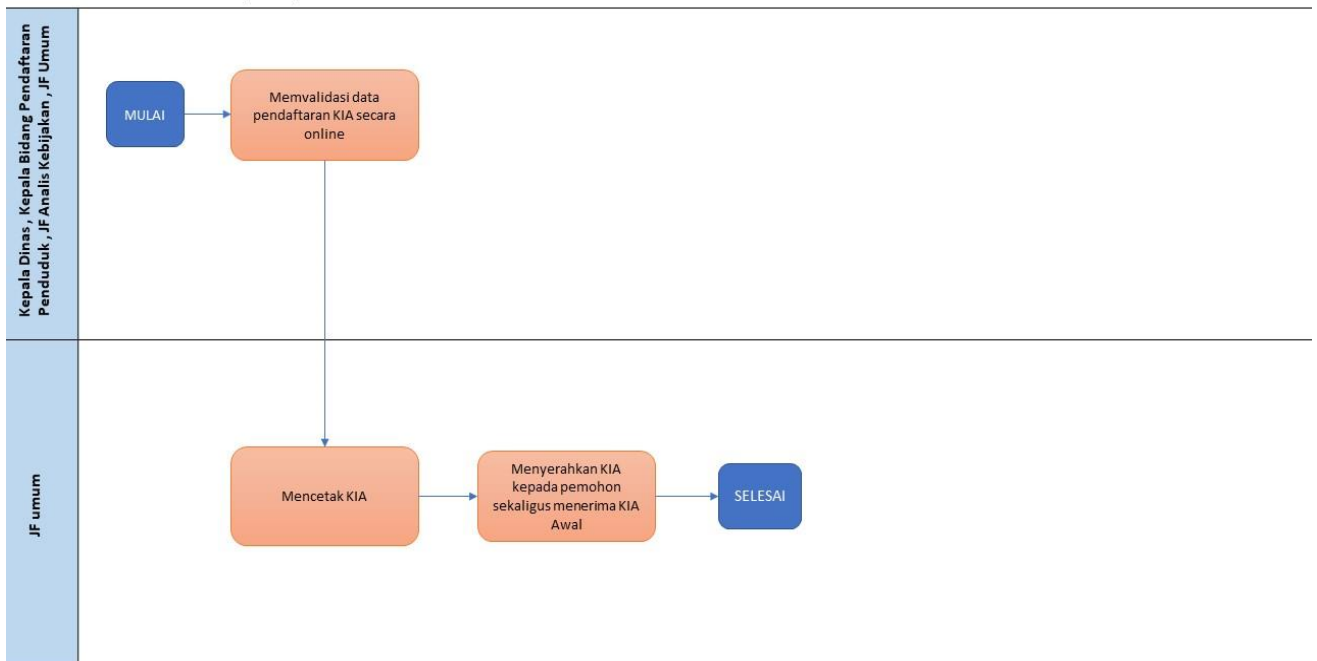


P.5.1.7.2.1.2 Meningkatkan pelayanan pendaftaran KIA



PETA LINTAS FUNGSI

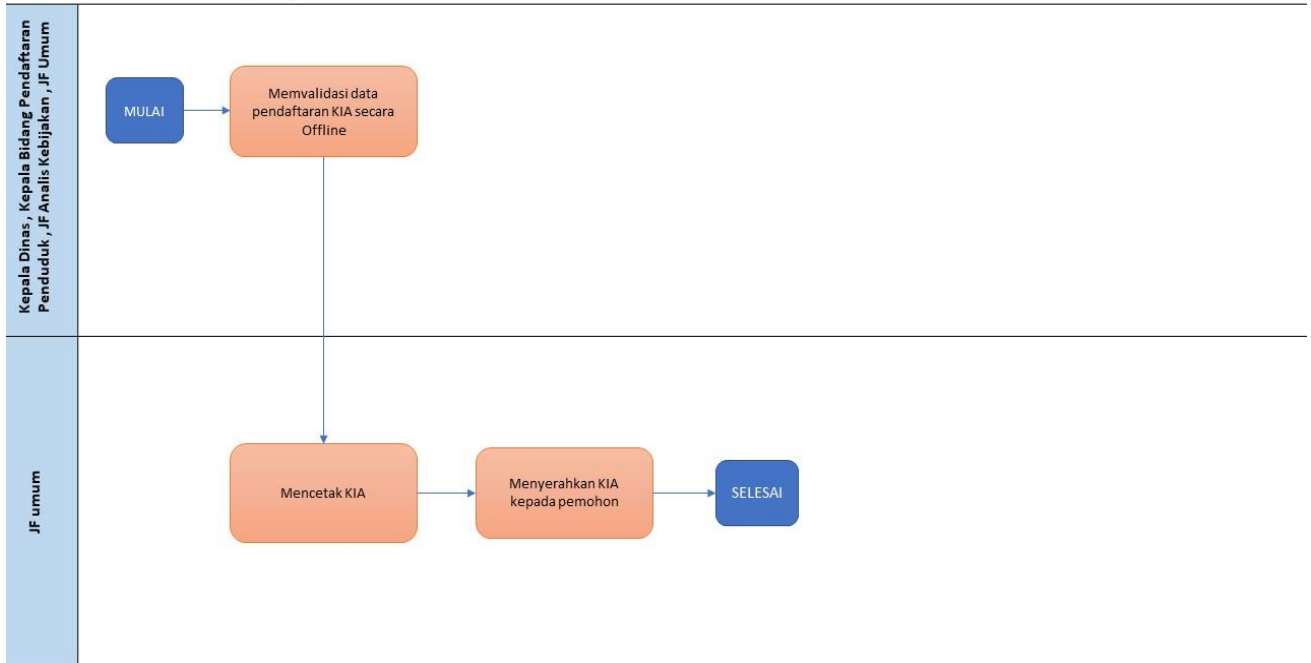
P.5.1.7.2.1.2.1 Memfasilitasi layanan pendaftaran KIA secara online



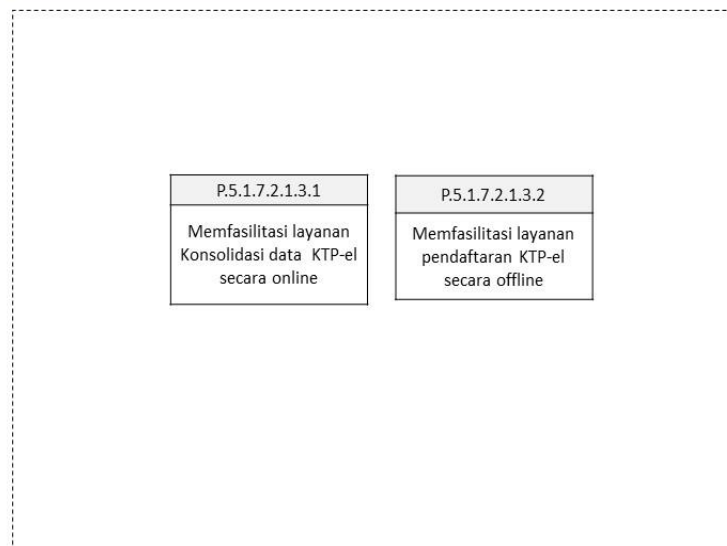


PETA LINTAS FUNGSI

P.5.1.7.2.1.2.2 Memfasilitasi layanan pendaftaran KIA secara offline



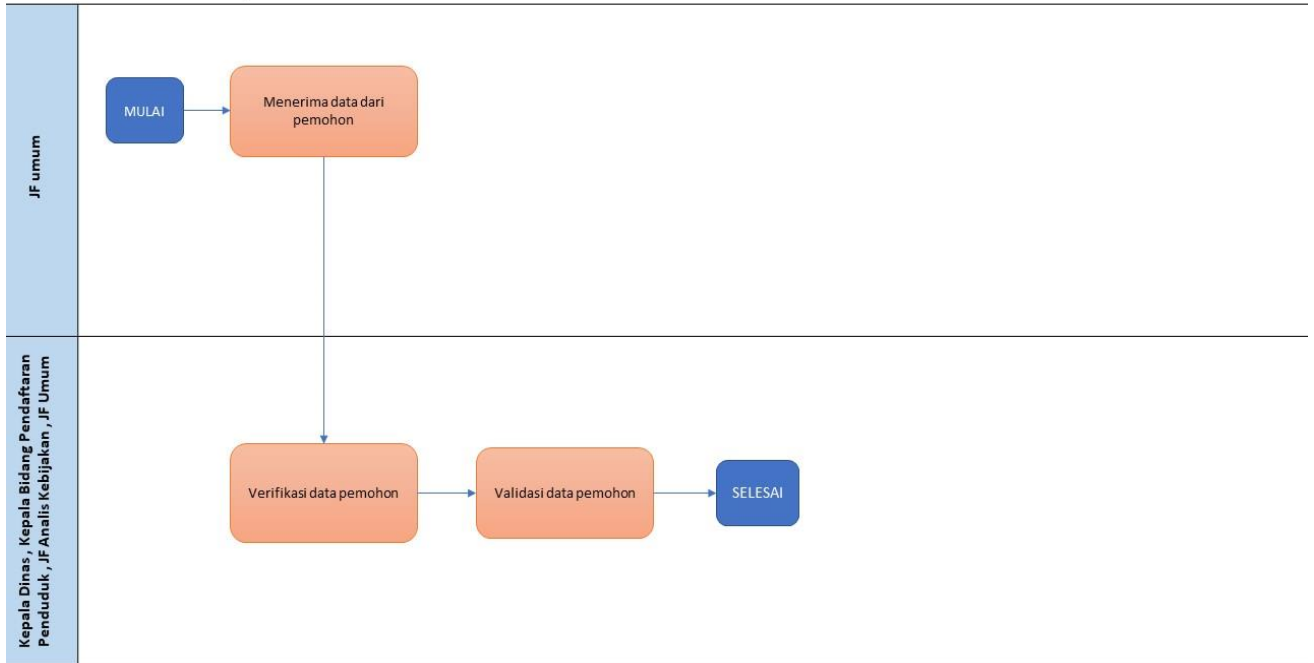
P.5.1.7.2.1.3 Meningkatkan pelayanan pendaftaran KTP elektronik





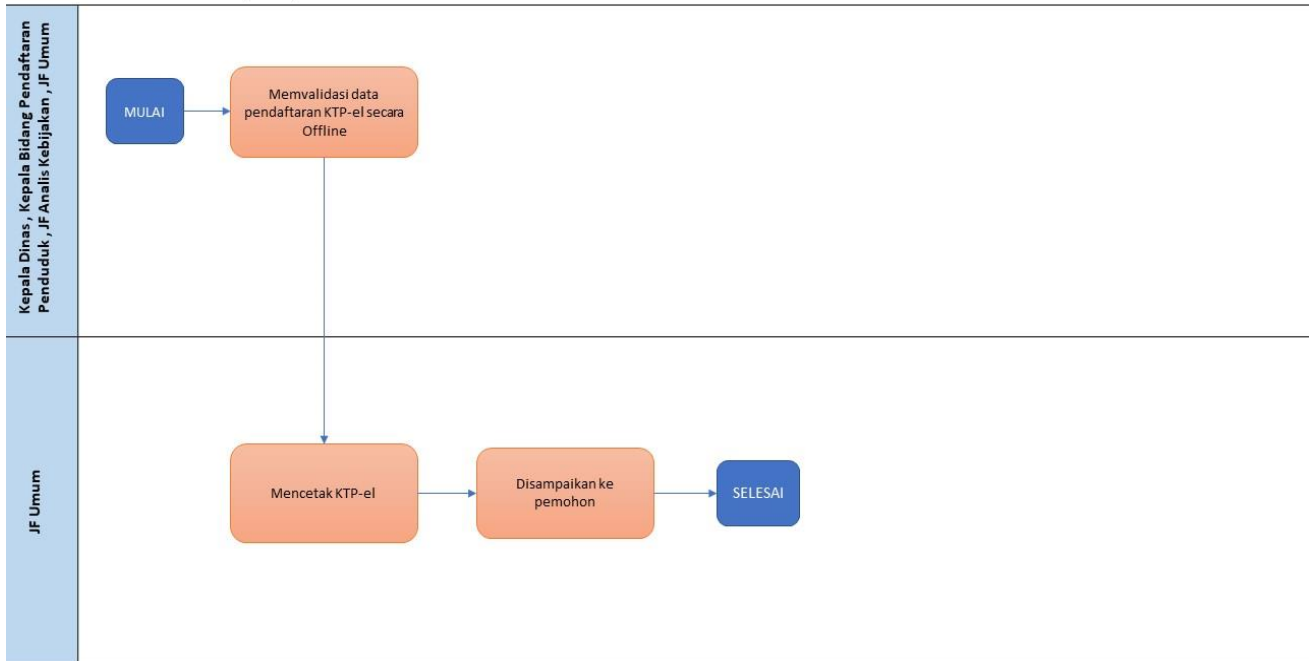
PETA LINTAS FUNGSI

P.5.1.7.2.1.3.1 Memfasilitasi layanan Konsolidasi data KTP-el secara online



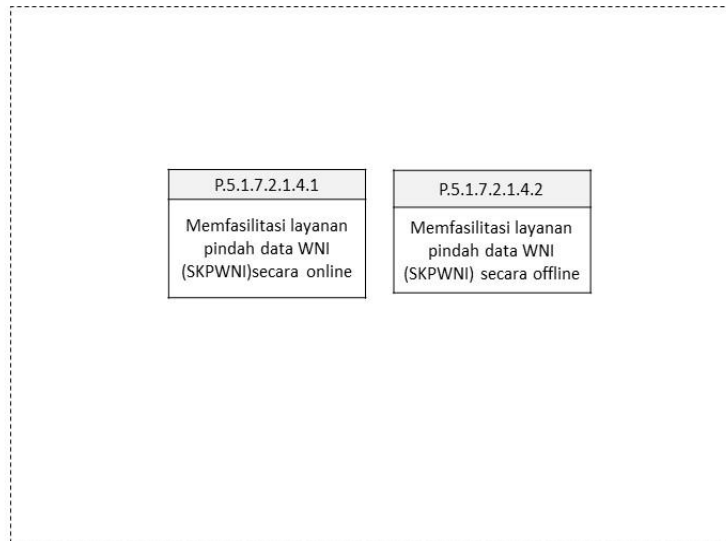
PETA LINTAS FUNGSI

P.5.1.7.2.1.3.2 Memfasilitasi layanan pendaftaran KTP-el secara offline

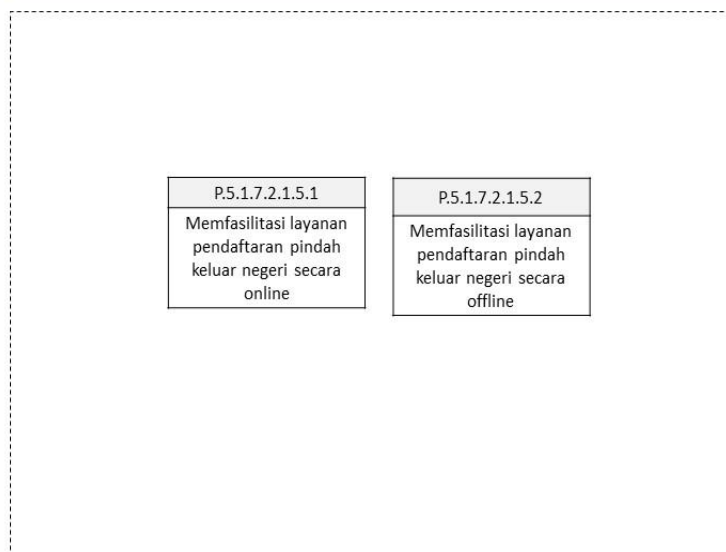




**P.5.1.7.2.1.4 Meningkatkan pelayanan pindah data WNI (SK PWNI)**



**P.5.1.7.2.1.5 Meningkatkan pelayanan pendaftaran pindah ke luar negeri**





**P.5.1.7.2.1.6 Meningkatkan pelayanan pendaftaran datang dari luar negeri**

P.5.1.7.2.1.6.1
Memfasilitasi layanan pendaftaran datang dari luar negeri secara online

P.5.1.7.2.1.6.2
Memfasilitasi layanan pendaftaran datang dari luar negeri secara offline

**P.5.1.7.2.1.7 Meningkatkan pelayanan pendaftaran tempat tinggal WNA (SKTT WNA)**

P.5.1.7.2.1.7.1
Memfasilitasi layanan pendaftaran tempat tinggal WNA (SKTT WNA) secara online

P.5.1.7.2.1.7.2
Memfasilitasi layanan pendaftaran tempat tinggal WNA (SKTT WNA) secara offline



**P.5.1.7.2.2 Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil**

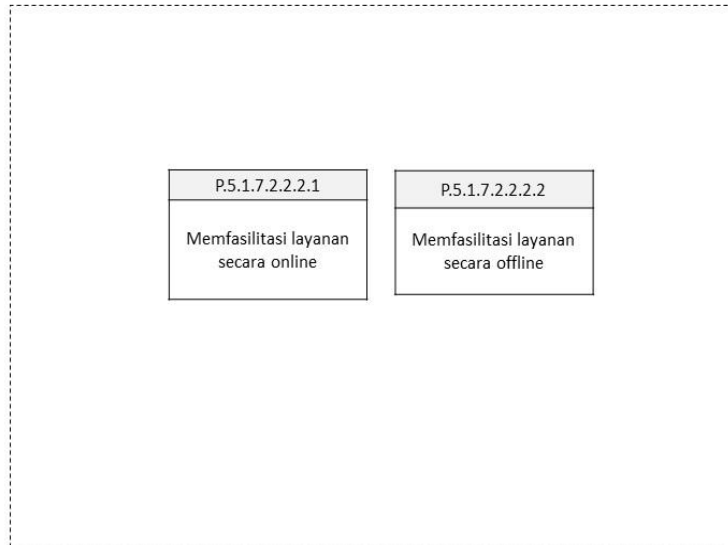
P.5.1.7.2.2.1	P.5.1.7.2.2.2	P.5.1.7.2.2.3	P.5.1.7.2.2.4	P.5.1.7.2.2.5
Meningkatkan pelayanan pembuatan akta kelahiran	Meningkatkan pelayanan pembuatan akta kematian	Meningkatkan pelayanan pembuatan akta perkawinan (non muslim)	Meningkatkan pelayanan pembuatan akta perceraian (non muslim)	Meningkatkan pelayanan pembuatan akta pengakuan anak
P.5.1.7.2.2.6	P.5.1.7.2.2.7	P.5.1.7.2.2.8	P.5.1.7.2.2.9	P.5.1.7.2.2.10
Meningkatkan pelayanan pembuatan akta pengesahan anak	Meningkatkan pelayanan surat keterangan lahir mati	Meningkatkan pelayanan surat keterangan pembatalan perkawinan non muslim	Meningkatkan pelayanan surat keterangan pembatalan perceraian non muslim	Meningkatkan pelayanan Surat keterangan perubahan status kewarganegaraan
P.5.1.7.2.2.11	P.5.1.7.2.2.12	P.5.1.7.2.2.13	P.5.1.7.2.2.14	P.5.1.7.2.2.15
Meningkatkan pelayanan surat keterangan perubahan nama	Meningkatkan pelayanan surat keterangan peristiwa lainnya	Meningkatkan pelayanan surat keterangan pengangkatan anak	Meningkatkan pelayanan surat keterangan pembetulan akta	Meningkatkan pelayanan surat keterangan pembatalan akta

**P.5.1.7.2.2.1 Meningkatkan pelayanan pembuatan akta kelahiran**

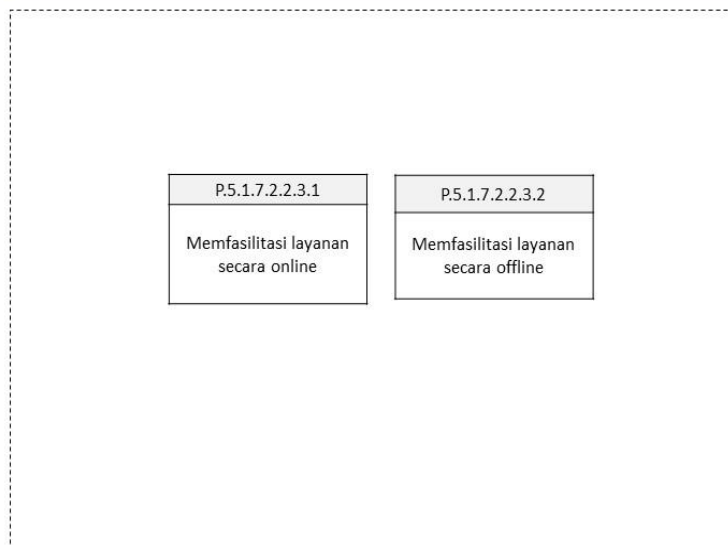
P.5.1.7.2.2.1.1	P.5.1.7.2.2.1.2
Memfasilitasi layanan secara online	Memfasilitasi layanan secara offline



**P.5.1.7.2.2.2 Meningkatkan pelayanan pembuatan akta kematian**

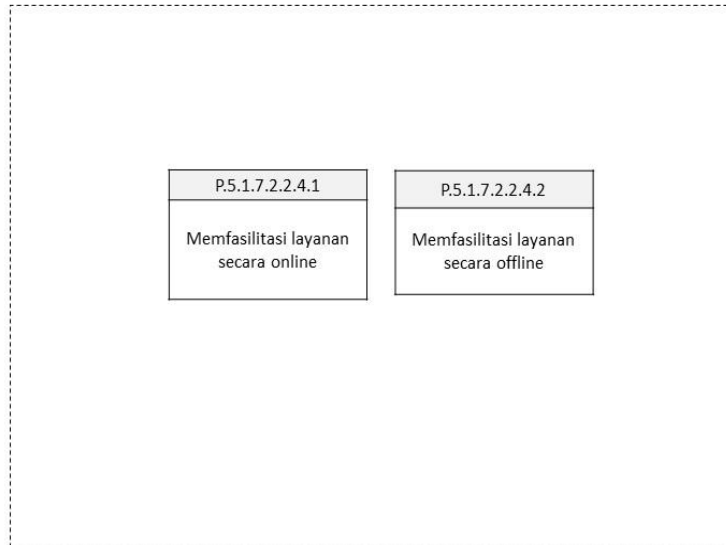


**P.5.1.7.2.2.3 Meningkatkan pelayanan pembuatan akta perkawinan (non muslim)**

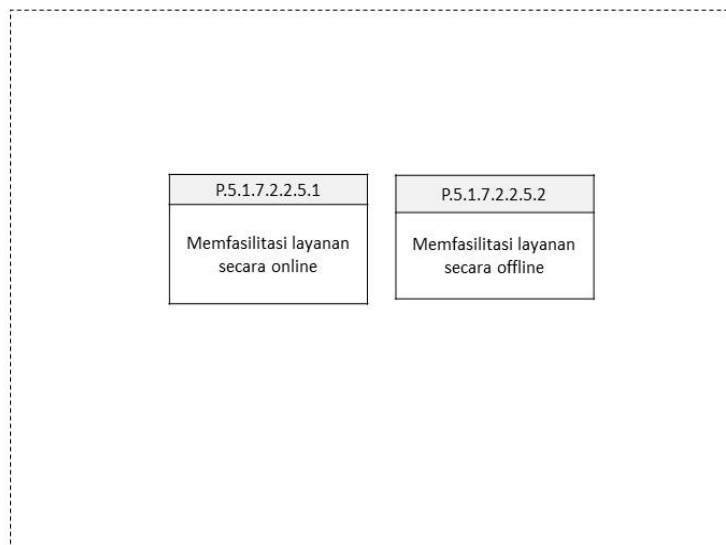




**P.5.1.7.2.2.4 Meningkatkan pelayanan pembuatan akta perceraian (non muslim)**

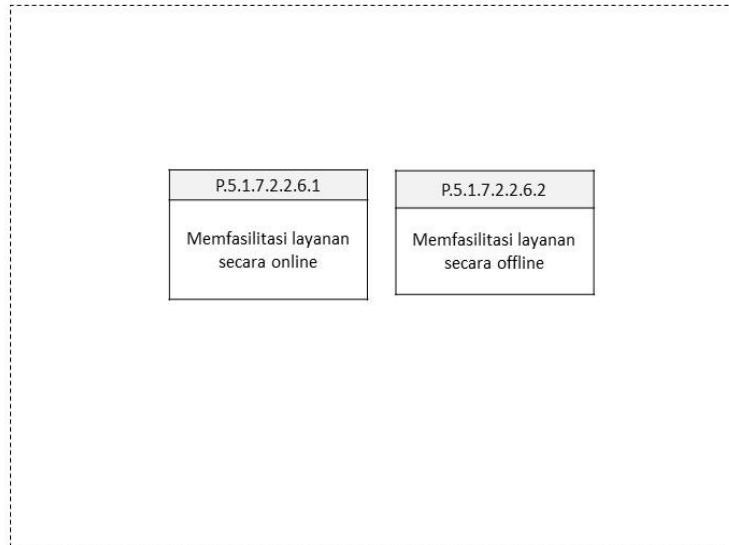


**P.5.1.7.2.2.5 Meningkatkan pelayanan pembuatan akta pengakuan anak**

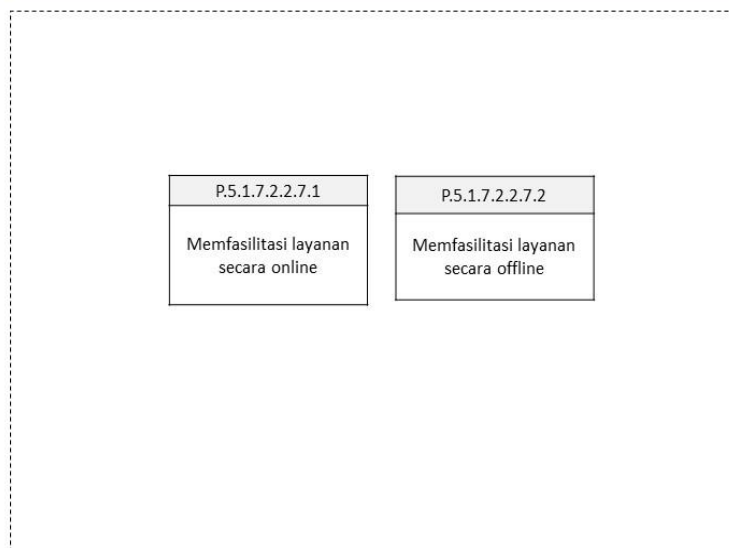




**P.5.1.7.2.2.6 Meningkatkan pelayanan pembuatan akta pengesahan anak**

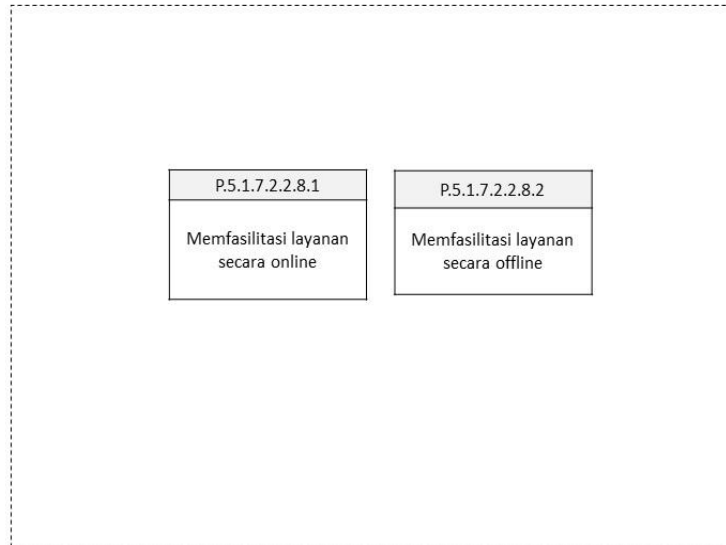


**P.5.1.7.2.2.7 Meningkatkan pelayanan pembuatan surat keterangan lahir mati**

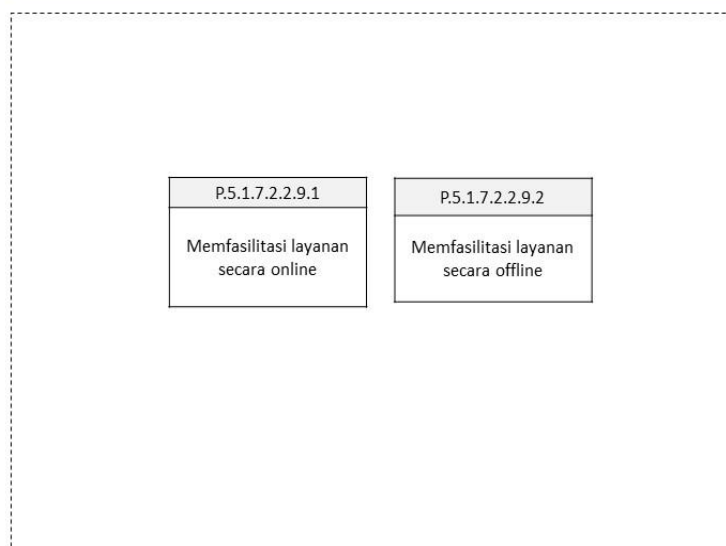




**P.5.1.7.2.2.8 Meningkatkan pelayanan surat keterangan pembatalan perkawinan non muslim**

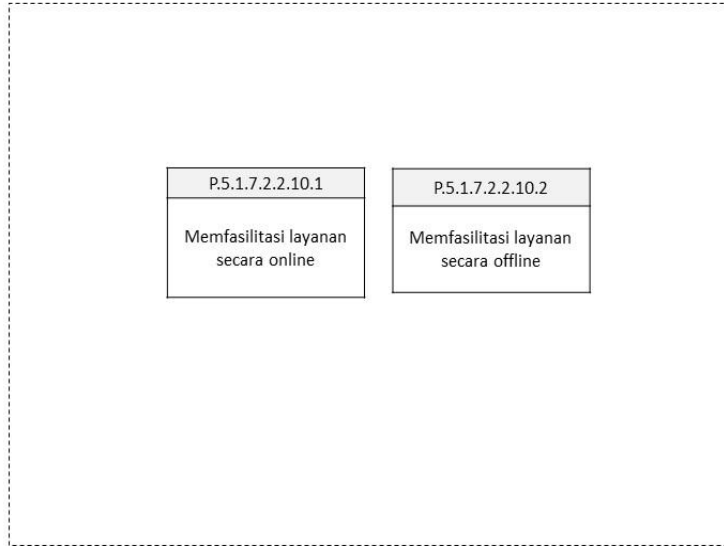


**P.5.1.7.2.2.9 Meningkatkan pelayanan surat keterangan pembatalan perceraian non muslim**

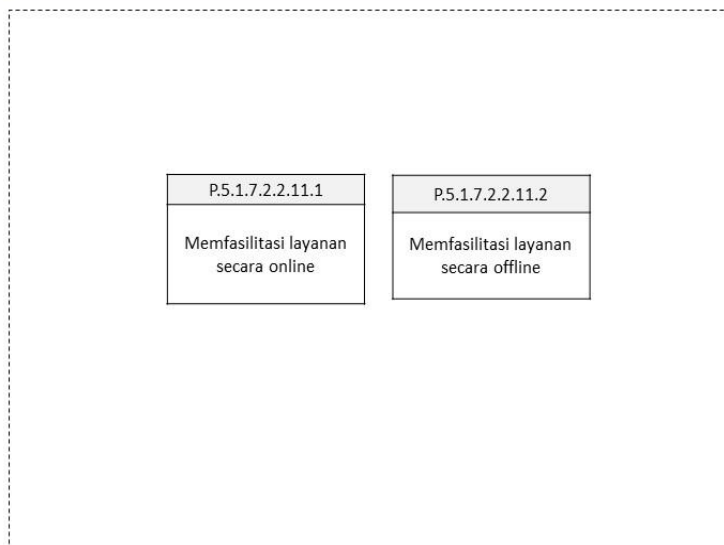




**P.5.1.7.2.2.10 Meningkatkan pelayanan Surat keterangan perubahan status kewarganegaraan**

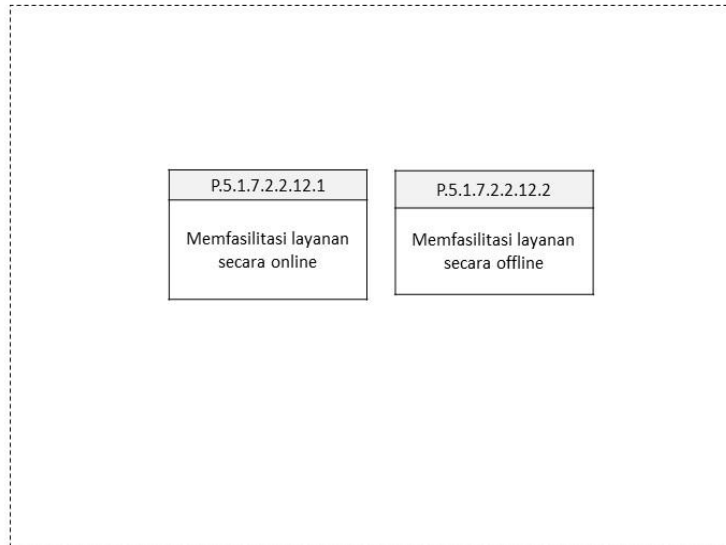


**P.5.1.7.2.2.11 Meningkatkan pelayanan surat keterangan perubahan nama**

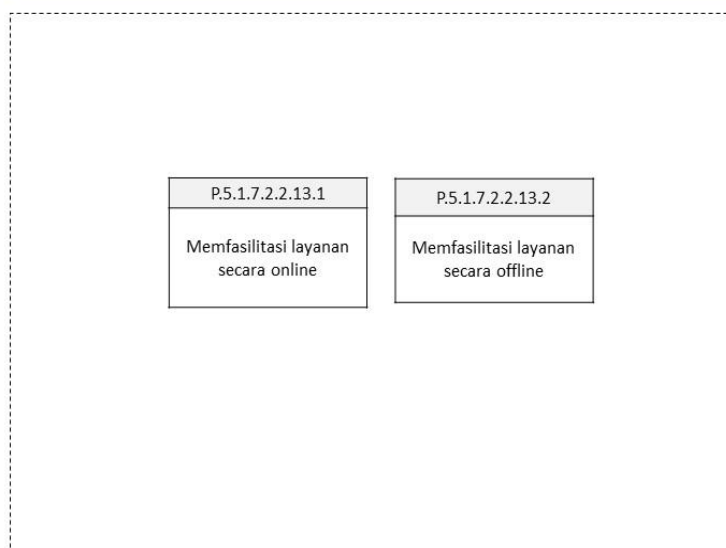




**P.5.1.7.2.2.12 Meningkatkan pelayanan surat keterangan peristiwa lainnya**

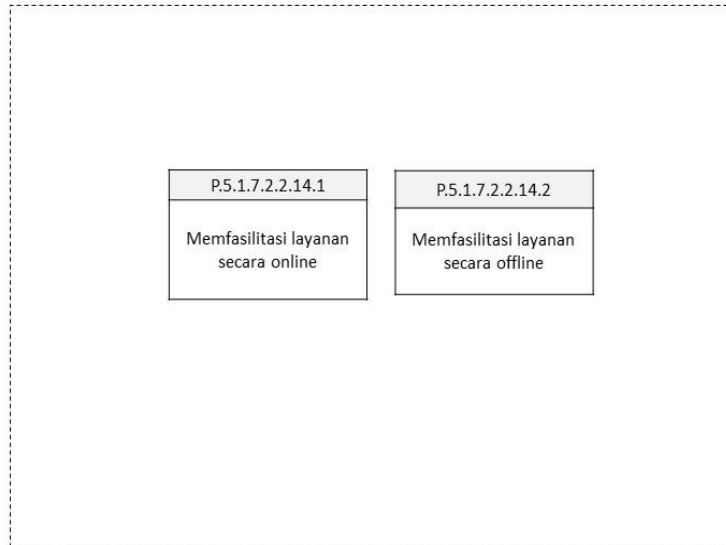


**P.5.1.7.2.2.13 Meningkatkan pelayanan surat keterangan pengangkatan anak**

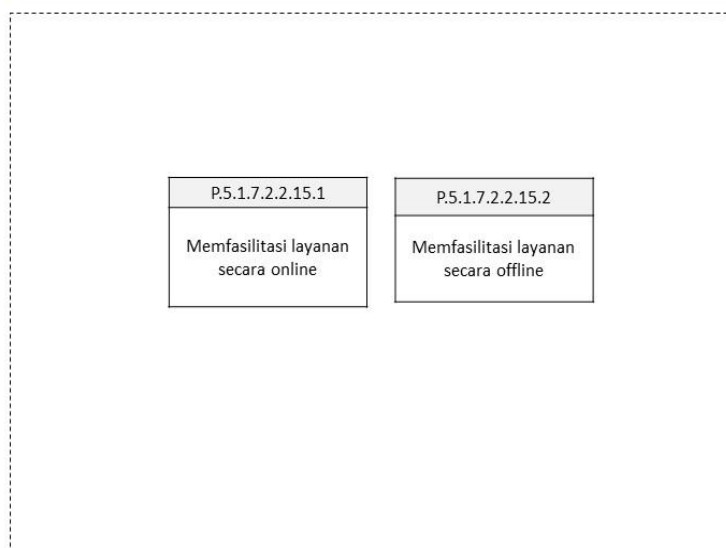




**P.5.1.7.2.2.14 Meningkatkan pelayanan surat keterangan pembetulan akta**

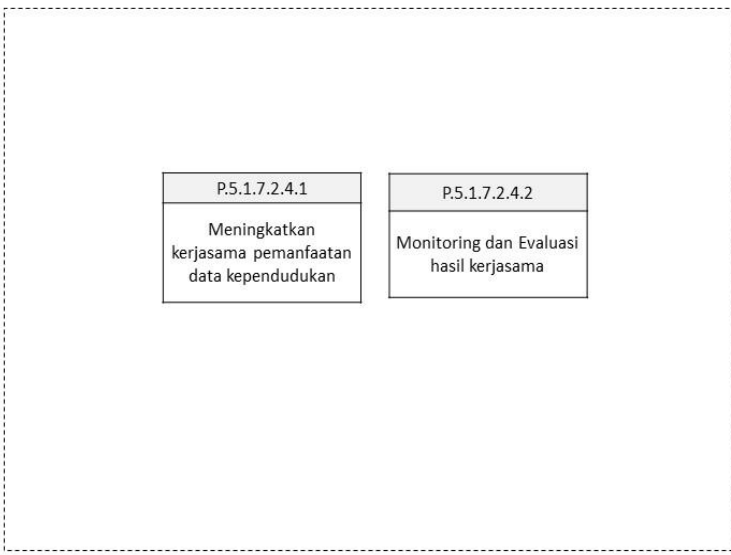


**P.5.1.7.2.2.15 Meningkatkan pelayanan surat keterangan pembatalan akta**



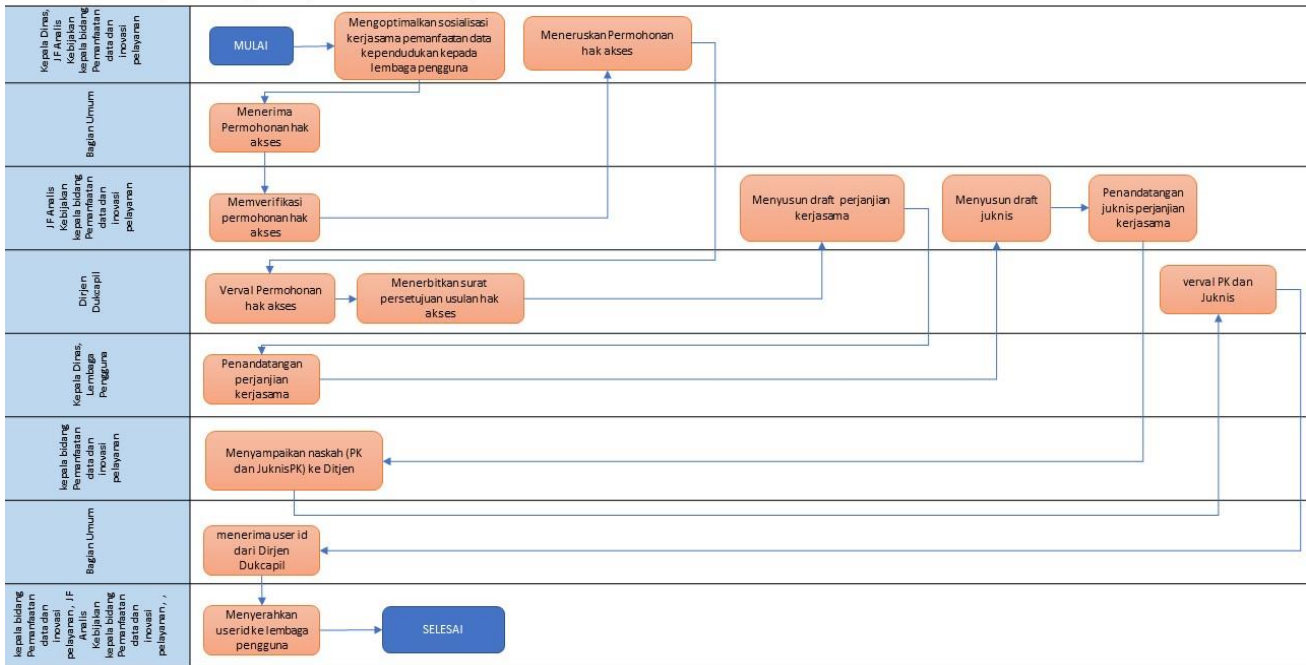


**P.5.1.7.2.4 Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan**



**PETA LINTAS FUNGSI**

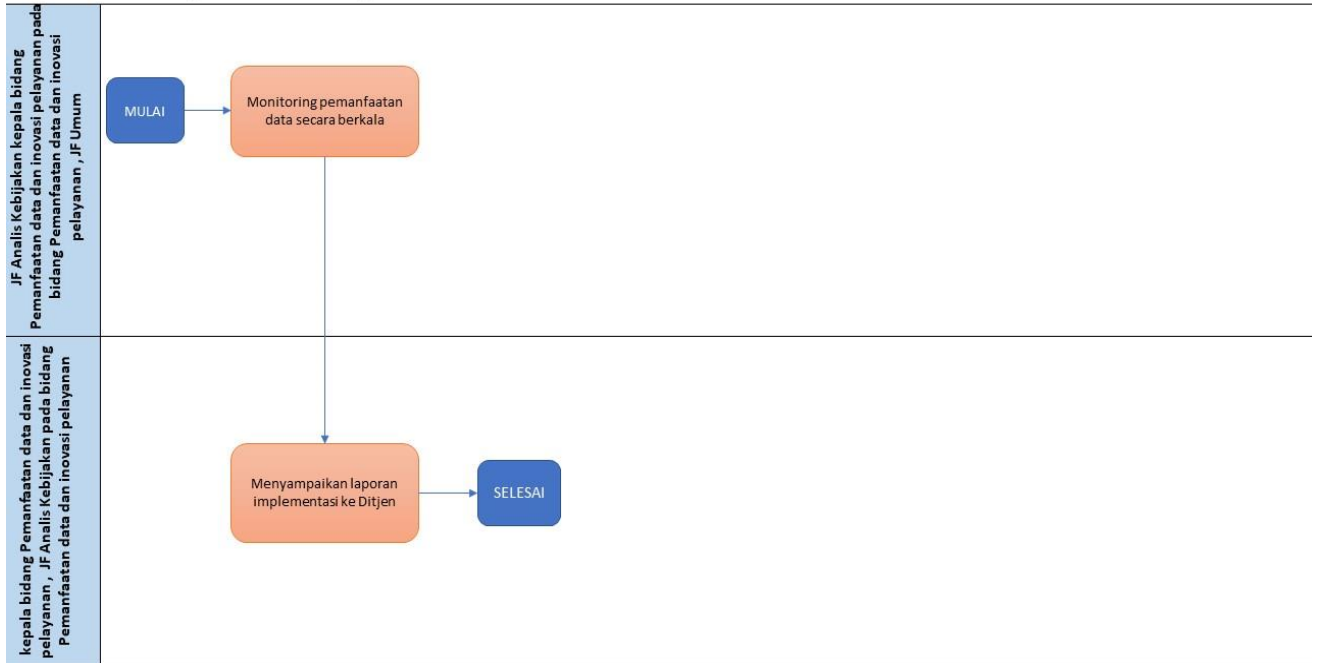
**P.5.1.7.2.4.1 Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan**





PETA LINTAS FUNGSI

P.5.1.7.2.4.2 Monitoring dan Evaluasi hasil kerjasama



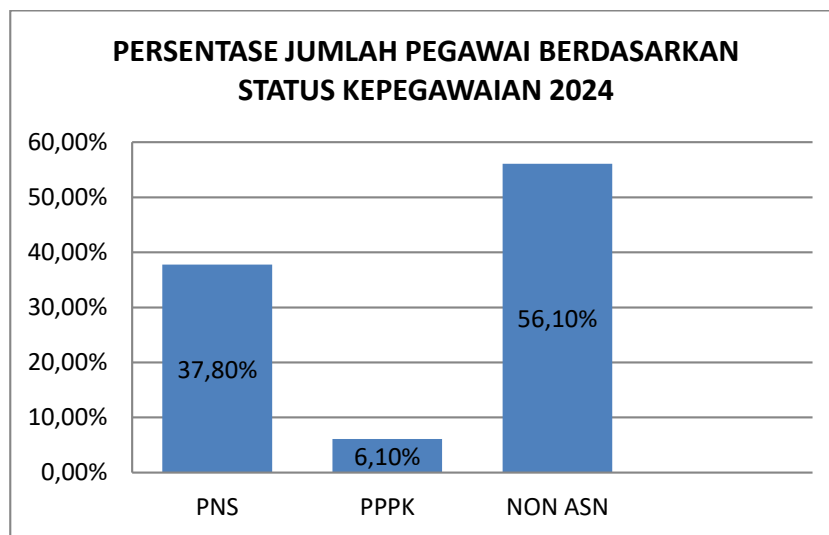


## 1.6 Keadaan Sumber Daya

### 1.6.1 Kepegawaian

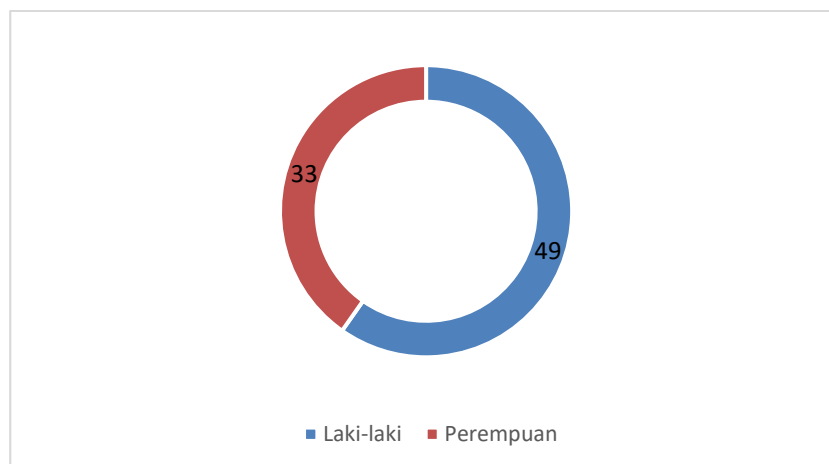
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis memiliki sumber daya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas. Pada akhir tahun 2024 terdapat 82 pegawai yang terdiri dari 31 orang PNS, 5 orang PPPK, 46 orang Non ASN.

Gambar 1.3 Komposisi Pegawai berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024



Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 59,76% (49 orang) dan sisanya sebanyak 40,24% merupakan pegawai perempuan (33 orang).

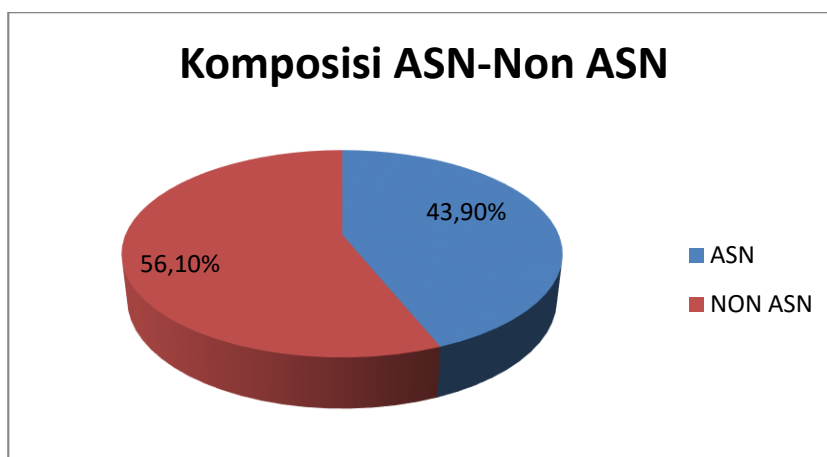
Gambar 1.4 Komposisi Pegawai berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024





Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 8 orang pejabat struktural, 4 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 19 orang jabatan fungsional umum (JFU), 5 orang PPPK, dan 46 orang Non ASN. Dengan komposisi 43,90 adalah pegawai ASN dan 56,10% pegawai Non ASN.

Gambar 1.5 Komposisi Pegawai berdasarkan ASN-Non ASN



Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
1.	Kepala	1 orang	Ada
2.	Sekretaris	1 orang	Ada
3.	Kepala Bidang	4 orang	
	• Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Ada
	• Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		Ada
	• Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Ada
	• Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan		Ada
4.	Kepala Sub Bagian	2 orang	
	• Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		Ada
	• Kepala Sub Bagian Keuangan		Ada
5.	Jabatan Fungsional Tertentu		
	Perencana Ahli Muda	1 orang	Ada
	Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda	3 orang	
	• Kelompok Subtansi Identitas Penduduk		Ada
	• Kelompok Subtansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk		Ada



No	Jabatan	Jumlah	Status Pengisian Jabatan
	• Kelompok Subtansi Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan		Tidak Ada
	• Kelompok Subtansi Pelayanan Kelahiran dan Kematian		Tidak Ada
	• Kelompok Subtansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		Tidak Ada
	• Kelompok Subtansi dan Penyajian Data Kependudukan		Tidak Ada
	• Kelompok Subtansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan		Ada
	• Kelompok Subtansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		Ada
6.	Jabatan Fungsional Umum	19 orang	Ada
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	5 orang	Ada
8.	Non ASN	44 orang	Ada

Sumber: Sekretariat Disdukcapil 2024

Gambar 1.6 Profil Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu



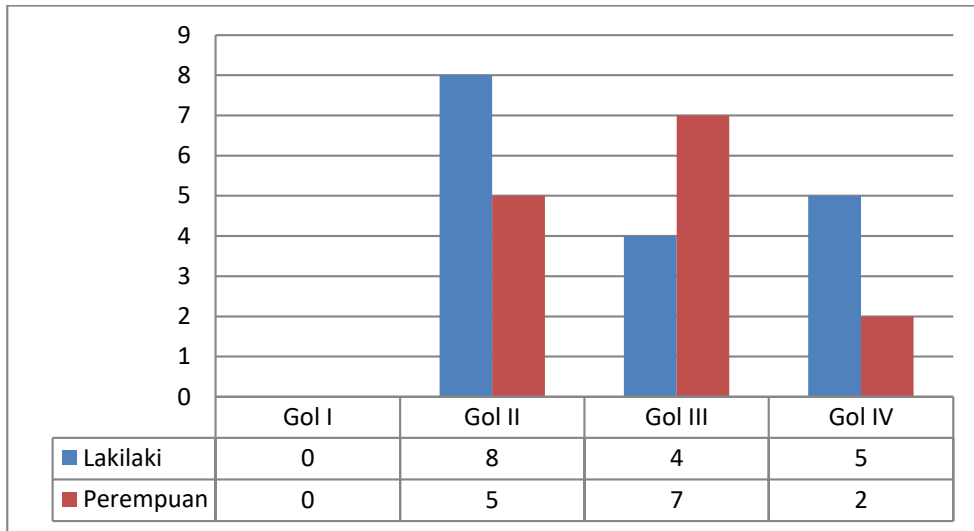
Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin pada gambar 1.4, menunjukkan bahwa pegawai laki-laki lebih banyak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu dibanding perempuan. Sedangkan pada tingkat eselon untuk tahun 2024 komposisi laki-laki yang menduduki jabatan juga lebih banyak dibanding dengan pegawai perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk



mendorong pengembangan karir perempuan masih kurang perlu dibuka kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis untuk berperan lebih luas dalam pengambilan kebijakan.

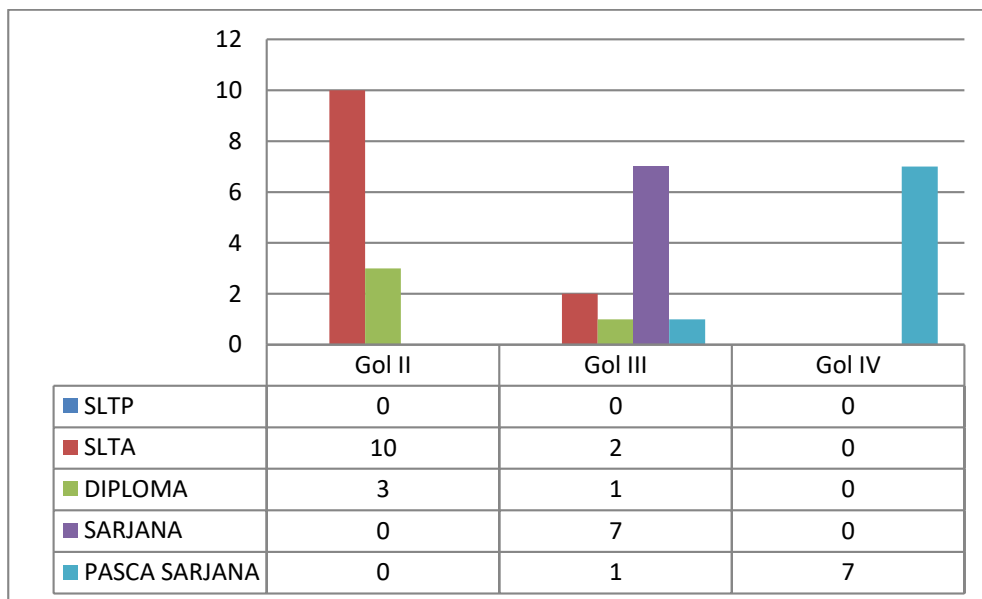
Gambar 1.7

Komposisi Pegawai Jenis Kelamin menurut Golongan Tahun 2024



Sedangkan apabila data dipilah menurut pendidikan pada tiap golongan menunjukkan bahwa PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian terbesar adalah golongan II dengan pendidikan SLTA.

Gambar 1.8 Komposisi Pegawai Jenis Kelamin menurut Golongan Tahun 2024





### 1.7 Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 1.3  
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya per 31 Desember 2024

No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	0	2
2.	Kendaraan Roda Empat	6	1	7
3.	Kendaraan Roda Dua	9	4	13
4.	Scanner	9	8	1
5.	Air Conditioner (AC)	13	4	17
6.	Mesin Ketik	0	1	1
7.	Mesin Penghitung Uang	0	1	1
8.	Lemari Besi Metal	8	0	8
9.	Lemari Kayu	2	0	2
10.	Rak Kayu	2	0	2
11.	Filling Cabinet Besi	5	0	5
12.	CCTV	0	7	7
13.	Papan Visual	1	0	1
14.	Alat Penghancur Kertas	0	1	1
15.	Mesin Absensi	0	1	1
16.	Mesin Antrian	1	1	2
17.	Tong Sampah	1	0	1
18.	Genset	1	0	1
19.	Kursi Besi Metal	22	7	29
20.	Kursi Roda	1	0	1
21.	Meja Resepsionis	2	0	0
22.	Meja Panjang	1	1	2
23.	Kursi Rapat	14	61	75
24.	Kursi Tamu	4	1	5
25.	Kursi Putar	8	7	15
26.	Kursi Biasa Kayu	14	16	30
27.	Kursi Biasa	5	18	23



No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
28.	Bangku Tunggu	5	2	7
29.	Meja Komputer	1	3	4
30.	Sofa	2	1	3
31.	Meja Biro	64	10	74
32.	Dinding Sekat Kayu	1	0	1
33.	Vacum Cleaner	1	0	1
34.	Lemari Es	1	1	2
35.	Exchause Fan	4	0	4
36.	Kompor Gas	1	0	1
37.	Tabus Gas	1	1	2
38.	Televisi	3	2	5
39.	Amplifier	0	1	1
40.	Sound System	1	1	2
41.	Compac Disk	0	4	4
42.	Wireless	1	0	1
43.	Microphone	1	1	2
44.	Unit Power Supply (UPS)	44	20	64
45.	Dispenser	1	2	3
46.	Handy Cam	0	1	1
47.	Gorden	0	1	1
48.	Alat Pemadam Kebakaran	6	0	6
49.	Kursi Kerja	2	7	9
50.	Lemari Buku	3	1	4
51.	Proyektor	1	1	2
52.	Kamera	21	7	28
53.	Tripod Kamera	13	13	26
54.	Mesin Pemetong Biasa	0	4	4
55.	Printer KTP-el	29	0	29
56.	Faksimile	0	1	1
57.	Pesawat Telephone	0	1	1
58.	Slide Proyektor	1	2	3
59.	Thermometer	0	1	1
60.	Stabilizer	2	4	6
61.	Mesin Laminating	0	3	3
62.	Batery Changer	0	8	8



No	Jenis Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
63.	Screen Pembatas	1	0	1
64.	Refrigator	1	1	2
65.	Standmix	0	2	2
66.	Speaker ADC	4	0	4
67.	DVD	1	0	1
68.	Mainframe Server	1	0	1
69.	LAN	0	1	1
70.	Komputer PC	70	36	106
71.	Laptop	18	19	37
72.	Handphone	12	25	37
73.	Cardrider	15	9	24
74.	Hardisk	8	9	17
75.	CPU CCTV	0	1	1
76.	Monitor Server	1	0	1
77.	Printer	48	47	95
78.	Printer KIA	8	0	8
79.	Server	8	0	8
80.	Finger Print	24	2	26
81.	Signature Pad	24	2	26
82.	Iris Mata	23	3	26
83.	Memory Server	3	1	4
84.	Scanner Biometrik	1	0	1
85.	Router	31	4	35
86.	Hub	13	1	14
87.	Modem	1	0	1
88.	Swich Hub	1	0	1

Sumber: Buku Inventaris Barang Tahun 2024

Dari sarana prasarana yang ada sebagian besar dalam kondisi yang baik dan digunakan untuk:

1. Pendukung operasional administrasi perkantoran
2. Pendukung operasional layanan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain:
  - Counter Layanan
  - Ruang Tunggu Layanan



- Nomor Antrian Elektronik
- Fasilitas Khusus Kelompok Rentan
- Ruang Laktasi
- Kidz Zone (Ruang Bermain Anak)
- Fasilitas Difabel
- Fasilitas Informasi dan Pengaduan
- Fasilitas Ruang Rapat
- Ruang Kearsipan
- Pelayanan Keliling



## 1.8 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.744.981.478,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 9.486.726.478,00 dan belanja modal sebesar Rp. 258.255.000,00. Dimana belanja operasi sebesar Rp. 9.486.726.478,00 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 3.975.991.378,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 5.510.735.100,00. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

## 1.9 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya; dan
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai perubahan rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal Bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

### LAMPIRAN



## **BAB 2**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ciamis yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019).

Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Ciamis merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten



Ciamis Tahun 2019-2024 dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

### **2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi berkaitan pandangan kedepan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu “Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua”. Sesuai ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 maka penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 sinergis dengan visi dan misi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (P-RPJPD) Tahun 2005-2025 yaitu “Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah;
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal;
4. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan
6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.



Tabel 2.1  
Ringkasan Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua	1. Mewujudkan keseimbangan pembanguna ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan</li> <li>2. Meningkatnya derajat kesehatan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan</li> <li>3. Meningkatnya daya beli masyarakat</li> <li>4. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat</li> <li>5. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan</li> </ol>
	2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata</li> <li>2. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman secara merata</li> </ol>
	3. Tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah</li> <li>2. Meningkatnya kualitas iklim usaha</li> <li>3. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial</li> <li>4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja</li> </ol>
	4. Meningkatnya tata kelola pemerintah yg efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas terhadap bencana</li> </ol>
	5. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas</li> <li>2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum</li> </ol>
	6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kemandirian desa</li> </ol>



Berangkat dari visi dan misi, dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2019-2024 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis mendukung misi ke-5 yaitu untuk “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien”. Dalam pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan indikator capaian sarannya yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”.

## **2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

### **2.1.2.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis selama 5 (lima) tahun anggaran dari tahun 2019-2024 adalah “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas”

### **2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Ciamis. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode tahun 2024 dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2  
Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis  
Tahun 2019-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25	80,50	80,75	81	81,25
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	95%	96%	100%	100%	100%
			Persentase Kepemilikan KTP-el	93%	96%	97%	98%	99%
			Persentase Kepemilikan KIA	10%	15%	20%	25%	30%
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	52%	54%	56%	58%	60%
			Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan	28 OPD	28 OPD	28 OPD	28 OPD	28 OPD
		Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	Jumlah SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang Menandatangani Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan Data	8 Lembaga	4 Lembaga	11 Lembaga	12 Lembaga	13 Lembaga
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,25 (Nilai)	80,50 (Nilai)	80,75 (Nilai)	81 (Nilai)	81,25 (Nilai)
			Hasil Evaluasi AKIP	BB (Predikat)	BB (Predikat)	BB (Predikat)	BB (Predikat)	A (Predikat)
			Level Maturitas SPIP	2 (Level)	3 (Level)	3 (Level)	3 (Level)	3 (Level)
			Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	766 (Nilai)	767 (Nilai)	768 (Nilai)	769 (Nilai)	770 (Nilai)

### 2.1.3 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:



Tabel 2.3  
Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	<p>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</li> <li>2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan</li> </ol>
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	<p>Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting</li> </ol>
		<p>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting</li> </ol>
Tersedianya Sistem Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<p>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</li> </ol>
		<p>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat</li> <li>2. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan</li> </ol>
		<p>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li> </ol>



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Meningkatnya Pendayagunaan Kependudukan Semua Keperluan Data untuk	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Meningkatnya Kinerja dan Organisasi Perangkat Daerah Akuntabilitas dan Kapasitas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li><li>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li><li>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li><li>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li></ol>

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.4  
Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	100
	2. Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	99
	3. Persentase Kepemilikan KIA	Persen	30
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	60
	2. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	Persen	100
Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan	OPD	28
Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	Jumlah SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang Menanda tangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	Lembaga	13
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,25
	2. Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	A
	3. Level Maturitas SPIP	Level	3
	4. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	770

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.8.476.676.136,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.8.451.676.136,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.25.000.000,00. Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2024 menjadi Rp.9.744.981.478,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.9.486.726.478,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.258.255.000,00.

#### 2.3.1 Target Belanja

Tabel 2.5  
Target Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis  
APBD Perubahan Tahun 2024

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasi	Rp.9.486.726.478,00	97,35%
Belanja Modal	Rp.258.255.000,00	2,65%
Jumlah	Rp.9.744.981.478,00	100%



### 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2024 berdasarkan perubahan APBD tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Rp.284.002.030,00	2,91%	-
1.1	Sasaran Program Pendaftaran Penduduk			
2.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Rp.85.171.000,00	0,87%	-
2.1	Sasaran Program Pencatatan Sipil			
3.	Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.1.517.315.650,00	15,57%	-
3.1	Sasaran Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
4.	Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	Rp.73.052.550,00	0,76%	-
4.1	Sasaran Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Rp.7.785.440.248,00	79,89%	-
5.1	Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			

Alokasi anggaran strategis digunakan untuk membiayai 4 program yang terdiri dari 8 kegiatan internal, 6 kegiatan eksternal. Kedua kegiatan tersebut terdiri dari 29 sub kegiatan internal dan 10 sub kegiatan eksternal yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sebagaimana Tabel 2.7 Program dalam mewujudkan capaian Sasaran Strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan Tabel 2.8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Keuangan dan Fisik pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan berikut:



Tabel 2.7  
Program Kegiatan dalam mewujudkan capaian Sasaran Strategis  
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	284.002.030
		1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	176.002.030
		2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	108.000.000
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	45.939.000
		1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.939.000
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
		1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	39.232.000
Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	38.403.000
		1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	38.403.000
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.434.162.850
		1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	200.000.000
		2. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	1.234.162.850
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.749.800
		1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.749.800
		Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	34.958.250		



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	38.094.300
		1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data kependudukan	38.094.300
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.312.500
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.562.500
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.750.000
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.750.000
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000
		5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.750.000
		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.992.251.578
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.975.991.378
		2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.000.000
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.750.000
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.510.200
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000
		1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000
		1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.324.277.970
		1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.688.615.100



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.318.000
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.025.000
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.200.000
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	104.752.000
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.916.770
		7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.824.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	258.255.000
		1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.255.000
		2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	984.113.200
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.260.000
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.973.200
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	839.880.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.530.000
		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.700.000
		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000

Dan berikut tabel rencana aksi perjanjian kinerja yang terbagi dalam rencana tata kelola keuangan dan fisik kegiatan.



**Tabel 2.8**  
**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja**

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET KEUANGAN BULANAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Anggaran Perubahan	Bobot (%)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.744.981.478	100	479.488.660	514.955.571	503.853.179	784.508.318	1.176.109.211	494.656.060	587.036.288	847.834.267	478.073.808	430.256.006	2.780.028.807	668.181.303
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.785.440.248	79,89	389.418.410	392.222.271	415.455.679	669.323.318	1.006.407.211	467.884.060	561.236.288	474.221.017	400.231.808	393.029.056	2.081.518.007	534.493.123
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.312.500	0,32	3.500.000	0	1.750.000	0	1.326.000	8.592.000	0	6.832.000	0	9.312.500	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan	15.562.500	0,17	0	0	0	0	1.326.000	5.092.000	0	6.832.000	0	2.312.500	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.750.000	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.750.000	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	0,03	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.500.000	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.750.000	0,02	0	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	0,03	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.992.251.578	40,97	275.037.818	271.631.551	280.913.498	321.389.363	385.320.919	296.484.288	444.258.739	311.652.592	285.133.445	290.023.363	415.203.001	415.203.001
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.975.991.378	40,80	272.325.618	271.631.551	280.913.498	321.389.363	385.320.919	290.441.688	444.258.739	307.684.992	285.133.445	286.485.563	415.203.001	415.203.001
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.000.000	0,06	0	0	0	0	0	3.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	0



**Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis**

Uraian	Anggaran Perubahan	Bobot (%)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.750.000	0,02	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.510.200	0,09	962.200	0	0	0	0	3.042.600	0	2.967.600	0	1.537.800	0	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	6.000.000	0,06	0	0	0	0	0	3.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6.000.000	0,06	0	0	0	0	0	3.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	0,06	0	0	0	0	0	3.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.000.000	0,06	0	0	0	0	0	3.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.324.277.970	23,85	6.849.700	18.095.200	30.173.000	259.666.220	400.932.850	34.285.000	26.010.000	50.470.100	19.676.000	1.170.000	1.452.426.850	24.523.050
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.824.000	0,08	691.700	757.700	440.000	1.301.000	0	901.000	0	2.452.000	1.228.000	0	0	52.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.956.242.200	20,07	0	0	0	224.400.000	366.287.850	0	0	0	0	0	1.365.554.350	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.318.000	0,06	567.000	941.000	0	0	604.000	530.000	0	2.610.000	860.000	0	0	206.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.025.000	0,14	480.000	1.892.500	0	0	340.000	0	720.000	2.290.000	0	840.000	6.142.500	1.320.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.200.000	0,22	0	400.000	0	0	200.000	18.800.000	400.000	400.000	600.000	0	400.000	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	104.752.000	1,08	0	720.000	360.000	20.000.000	10.720.000	360.000	330.000	20.330.000	10.330.000	330.000	40.330.000	942.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.916.770	2,20	5.111.000	13.384.000	29.373.000	13.965.220	22.781.000	13.694.000	24.560.000	22.388.100	6.658.000	0	40.000.000	22.002.450
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	258.255.000	2,65	7.500.000	0	0	0	128.038.500	7.500.000	5.000.000	0	0	0	110.216.500	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.255.000	2,50	0	0	0	0	128.038.500	0	5.000.000	0	0	0	110.216.500	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	0,15	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0



**Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis**

Uraian	Anggaran Perubahan	Bobot (%)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	984.113.200	10,10	84.763.392	83.495.520	79.819.181	79.174.935	79.196.442	79.752.472	79.838.549	81.530.325	81.400.363	81.161.593	83.918.356	90.062.072
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.260.000	0,01	150.000	100.000	110.000	0	190.000	80.000	100.000	0	530.000	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.973.200	1,47	13.248.392	12.030.520	11.344.181	10.934.935	10.516.442	11.307.472	11.373.549	11.665.325	11.005.363	11.296.593	14.053.356	14.197.072
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	839.880.000	8,62	71.365.000	71.365.000	68.365.000	68.240.000	68.490.000	68.365.000	68.365.000	69.685.000	69.685.000	69.685.000	69.685.000	75.865.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.230.000	1,88	11.767.500	19.000.000	22.800.000	9.092.800	11.592.500	35.270.300	6.129.000	21.736.000	14.022.000	7.361.600	19.753.300	4.705.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.530.000	1,13	6.767.500	15.000.000	14.800.000	2.592.800	5.092.500	9.925.300	4.129.000	13.736.000	8.522.000	6.361.600	18.898.300	4.705.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	0,31	5.000.000	2.000.000	6.000.000	0	500.000	645.000	2.000.000	8.000.000	4.000.000	1.000.000	855.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.700.000	0,36	0	0	0	6.500.000	6.000.000	22.200.000	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	0,08	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0
Program Pendaftaran Penduduk	284.002.030	2,91	20.600.000	33.961.000	23.490.000	20.000.000	18.373.000	18.372.000	17.400.000	33.000.000	19.410.000	21.194.450	26.809.450	31.392.130
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	284.002.030	2,92	20.600.000	33.961.000	23.490.000	20.000.000	18.373.000	18.372.000	17.400.000	33.000.000	19.410.000	21.194.450	26.809.450	31.392.130
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	176.002.030	1,81	20.600.000	33.961.000	23.490.000	20.000.000	18.373.000	18.372.000	0	15.000.000	1.410.000	3.194.450	8.809.450	12.792.130
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	108.000.000	1,11	0	0	0	0	0	0	17.400.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.600.000
Program Pencatatan Sipil	85.171.000	0,87	5.600.000	10.726.000	8.500.000	5.600.000	3.970.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.676.000	4.779.000	5.957.250	21.362.750
Pelayanan Pencatatan Sipil	45.939.000	0,47	0	6.145.500	2.624.000	5.600.000	0	3.000.000	0	3.000.000	6.676.000	3.000.000	1.344.000	14.549.500
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.939.000	0,47	0	6.145.500	2.624.000	5.600.000	0	3.000.000	0	3.000.000	6.676.000	3.000.000	1.344.000	14.549.500
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	39.232.000	0,40	5.600.000	4.580.500	5.876.000	0	3.970.000	0	3.000.000	0	3.000.000	1.779.000	4.613.250	6.813.250



**Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis**

Uraian	Anggaran Perubahan	Bobot (%)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	39.232.000	0,40	5.600.000	4.580.500	5.876.000	0	3.970.000	0	3.000.000	0	3.000.000	1.779.000	4.613.250	6.813.250
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.590.368.200	16,32	63.870.250	78.046.300	56.407.500	89.585.000	147.359.000	5.400.000	5.400.000	337.613.250	48.756.000	11.253.500	665.744.100	80.933.300
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	73.361.250	0,75	4.013.750	0	3.842.000	8.000.000	7.384.500	5.400.000	5.400.000	5.400.000	7.766.000	0	7.320.000	18.335.000
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	38.403.000	0,39	0	0	2.592.000	8.000.000	6.390.000	5.400.000	0	0	0	0	7.320.000	8.701.000
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	34.958.250	0,36	4.013.750	0	1.250.000	0	994.500	0	5.400.000	5.400.000	7.766.000	0	0	10.134.000
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.472.257.150	15,11	51.256.500	65.172.000	44.565.500	81.585.000	139.974.500	0	0	332.213.250	40.000.000	11.253.500	651.115.100	55.121.800
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	38.094.300	0,39	0	4.101.000	1.749.500	0	0	0	0	0	0	7.398.000	9.724.000	15.121.800
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	200.000.000	2,05	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	80.000.000	40.000.000
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	1.234.162.850	12,66	51.256.500	61.071.000	42.816.000	81.585.000	99.974.500	0	0	332.213.250	0	3.855.500	561.391.100	0
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.749.800	0,46	8.600.000	12.874.300	8.000.000	0	0	0	0	0	990.000	0	7.309.000	6.976.500
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.749.800	0,46	8.600.000	12.874.300	8.000.000	0	0	0	0	0	990.000	0	7.309.000	6.976.500



## BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis kedepan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut rumusan indikator sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1  
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dibagi Jumlah Kepala Keluarga dikali 100%	95%	96%	100%	100%	100%
		Persentase Kepemilikan KTP-el	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP dikali 100%	93%	96%	97%	98%	99%
		Persentase Kepemilikan KIA	Jumlah Anak 0-17 tahun kurang dari satu hari sudah memiliki KIA dibagi Jumlah Anak usia 0-17 tahun dikali 100%	10%	15%	20%	25%	30%
2.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk sudah memiliki Akta Kelahiran dibagi Jumlah Penduduk dikali 100%	52%	54%	56%	58%	60%
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	Jumlah Kutipan Akta kematian yang ditebitkan dibagi Jumlah Peristiwa kematian yang dilaporkan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
3.	Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang tersedia Perangkat SIAK	28 OPD	28 OPD	28 OPD	28 OPD	28 OPD
4.	Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	Jumlah SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	Jumlah SKPD dan Lembaga yang telah memanfaatkan data Admuduk berdasarkan Perjanjian Kerjasama	8 Lembaga	4 Lembaga	11 Lembaga	12 Lembaga	13 Lembaga
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian	80,25	80,50	80,75	81	81,25
		Hasil Evaluasi AKIP	Hasil Penilaian	BB	BB	BB	BB	A
		Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian	2	3	3	3	3
		Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Hasil Penilaian	766	767	768	769	770

*Sumber data: Perubahan Renstra Disdukcapil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024*

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Sasaran kinerja yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
2. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil;
3. Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan; dan
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah.

Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja kegiatan eksternal (penentuan posisi) sesuai tingkat capaian kinerja yaitu:



Tabel 3.2  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat rendah

Sehingga dapat dilihat capaian kinerja tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Capaian	
					Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dibagi Jumlah Kepala Keluarga dikali 100%	100%	100
		Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP dikali 100%	99,23%	100,23
		Persentase Kepemilikan KIA	30%	Jumlah Anak 0-17 tahun kurang dari satu hari sudah memiliki KIA dibagi Jumlah Anak usia 0-17 tahun dikali 100%	42,24%	140,80
2.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	60%	Jumlah Penduduk sudah memiliki Akta Kelahiran dibagi Jumlah Penduduk dikali 100%	40,76%	67,93
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	Jumlah Kutipan Akta kematian yang ditebitkan dibagi Jumlah Peristiwa kematian yang dilaporkan dikali 100%	100%	100
3.	Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan	28 OPD	Jumlah OPD yang tersedia Perangkat SIAK dibagi Jumlah OPD yang melaksanakan pelayanan Adminduk	28 OPD	100
4.	Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	Jumlah SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	13 Lembaga	Jumlah SKPD dan Lembaga yang telah memanfaatkan data Adminduk berdasarkan Perjanjian Kerjasama dibagi Jumlah permohonan SKPD dan Lembaga yang mengajukan Perjanjian Kerjasama	26 Lembaga	200



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Capaian	
					Realisasi	%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25	Hasil Penilaian	92,17	113,44
		Hasil Evaluasi AKIP	A	Hasil Penilaian	BB	91,25
		Level Maturitas SPIP	3	Hasil Penilaian	3	100
		Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	770	Hasil Penilaian	770,79	100,10

*Sumber data: Review Perubahan Renstra Disdukcapil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024*

Pada tahun 2024, pencapaian indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis berdasarkan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

1. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga mencapai 100% dari target sebesar 100% dengan persentase capaian 100% termasuk dalam kriteria sangat baik;
2. Persentase Kepemilikan KTP-el mencapai 99,23% dari target sebesar 99% dengan persentase capaian 100,23% termasuk dalam kriteria sangat baik;
3. Persentase Kepemilikan KIA mencapai 42,24% dari target sebesar 30% dengan persentase capaian 140,80 % termasuk dalam kriteria sangat baik;
4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 40,76% dari target sebesar 60% dengan persentase capaian 67,93% termasuk dalam kriteria sedang;
5. Persentase Kepemilikan Akta Kematian mencapai 100% dari target sebesar 100% dengan persentase capaian 100% termasuk dalam kriteria sangat baik;
6. Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan mencapai 28 OPD dari target sebesar 28 OPD dengan persentase capaian 100% termasuk dalam kriteria sangat baik;
7. Jumlah SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data mencapai 26 Lembaga dari target sebesar 13 OPD dengan persentase capaian 200% termasuk dalam kriteria sangat baik;
8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 92,17 (Nilai) dari target sebesar 81,25 (Nilai) dengan persentase capaian 113,44% termasuk dalam kriteria sangat baik;
9. Hasil Evaluasi AKIP mencapai BB (Predikat) dari target sebesar A (Predikat) dengan persentase capaian 91,25% termasuk dalam kriteria sangat baik;
10. Level Maturitas SPIP mencapai 3 (Level) dari target sebesar 3 (Level) dengan persentase capaian 100% termasuk dalam kriteria sangat baik;



11. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan mencapai 770,79 (Level) dari target sebesar 770 (Level) dengan persentase capaian 100,10% termasuk dalam kriteria sangat baik;

Berdasarkan tabel 3.3 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4  
Data Pengukuran Kinerja Masing-masing Program Tahun 2024

No	Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Capaian	
					Realisasi	%
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga	100%	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga dibagi Jumlah Kepala Keluarga dikali 100%	100%	100
		Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	99%	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP dikali 100%	99,23%	100,23
2.	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	60%	Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk dikali 100%	40,76%	67,93
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100%	Jumlah Kutipan Akta kematian yang ditebitkan dibagi Jumlah Peristiwa kematian yang dilaporkan dikali 100%	100%	100
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Dikelola Secara Elektronik	100%	Jumlah Penyajian Data Kependudukan secara Elektronik dibagi 1 tahun dikali 100%	100%	100
		Persentase Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	Jumlah OPD dan Lembaga yang telah memanfaatkan data Adminduk berdasarkan Perjanjian Kerjasama dibagi Jumlah permohonan OPD dan Lembaga yang mengajukan Perjanjian Kerjasama	100%	100
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rata-rata Capaian Target Kegiatan	100%	100

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Ciamis mencapai 76,45% hal itu ditinjau dari persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk yang terdiri dari kepemilikan Kartu Keluarga, KTP-el, dan KIA penduduk Kabupaten Ciamis dan penerbitan dokumen pencatatan sipil yang terdiri dari penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Bila capaian tersebut dibandingkan dengan target yang harus dicapai sebesar 77,80%, maka persentase capaian 98,26% atau



mendekati dari 100% artinya capaian kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Ciamis berhasil.

Selain kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdapat indikator tambahan sebagai pendukung tercapainya sasaran perangkat daerah persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik berupa penyajian data kependudukan dalam satu tahun dan persentase data kependudukan yang dimanfaatkan perangkat daerah dan unit kerja atau lembaga dilingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis.

Pada tahun 2024 terdapat 26 OPD/unit kerja/lembaga yaitu (...) dari target 13 yang mengajukan permohonan pemanfaatan data, atau dengan kata lain tercapai 200%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, terdapat perubahan mekanisme dan prosedur dalam permohonan atau pengajuan hak akses pemanfaatan data kependudukan, sehingga Perjanjian Kerjasama (PKS) di tingkat pemerintah Kabupaten Ciamis perlu diperbaharui, dimana mekanisme dan prosedur perolehan hak akses pemanfaatan data harus mendapatkan izin PKS terlebih dahulu dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Selama tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis telah mengajukan izin PKS Akses Data sebanyak 26 OPD/unit kerja/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Dari 26 OPD/unit kerja/lembaga yang telah diberikan izin PKS semuanya telah diberikan hak akses pemanfaatan data. Kecepatan dalam mendapatkan hak akses pemanfaatan data tersebut tergantung dari respon Direktorat Jenderal Dukcapil.



### **3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Dalam sub bab ini akan disajikan evaluasi pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja.

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, factor pendukung dan penghambat atau permasalahan yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dimasa yang akan datang, seperti yang tertera dalam tabel berikut:



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan program, kegiatan, dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke kelima dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024. Dalam pengukuran kinerja, keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf, stakeholder terkait termasuk kecamatan dan partisipasi masyarakat. Terhadap keberhasilan yang dicapai, diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari analisis 5 sasaran, dengan 11 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur, pada tahun 2024 indikator yang ditetapkan sudah memenuhi target. Berikut capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran.

Tabel 4.1  
Capaian per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	100%	100	284.002.030	271.406.450	95,56
		Persentase Kepemilikan KTP-el	99%					
		Persentase Kepemilikan KIA	30%					



No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	60%			85.171.000	68.077.000	79,93
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100			
3.	Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan	28 OPD			1.517.315.650	1.489.779.950	98,18
4.	Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	Jumlah SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	13 Lembaga	28 Lembaga	215,38	73.052.550	52.923.750	72,45
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25			7.785.440.248	6.040.520.552	77,59
		Hasil Evaluasi AKIP	A					
		Level Maturitas SPIP	3					
		Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	770					
<b>Jumlah</b>						<b>9.744.981.478</b>	<b>7.922.707.702</b>	<b>81,30</b>

## 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang berlaku;
2. Mengintensifkan kegiatan jempul bola pelayanan KTP-el bagi pemula dan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun;
3. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi terkait pentingnya segera melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el dan pentingnya kepemilikan IKD dan manfaat serta keamanannya;
4. Meminimalisir dampak pencemaran lingkungan dalam kegiatan pembakaran KTP-el; dan
5. Mengintensifkan kegiatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan pemerintah pusat (Ditjen Dukcapil), Dukcapil daerah lain, maupun instansi-instansi terkait dalam peningkatan kualitas pelayanan maupun dalam pemanfaatan data kependudukan.